10/40462.pdf

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

PERAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN NELAYAN (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Desa Bajo Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan)

UNIVERSITAS TERBUKA

TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk
Memperoleh Gelar Magister Sains dalam Ilmu Kelautan
Bidang Minat Manajemen Perikanan

Disusun Oleh :
Abdullah Soleman
NIM. 014629601

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2010

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

10/40462.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU KELAUTAN
BIDANG MINAT MANAJEMEN PERIKANAN

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Peran Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Desa Bajo Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan) adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Ternate, 17 Juli 2010
Yang Menyatakan

(Abdullah Soleman)
NIM. 014629601

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

10/40462.pdf

ABSTRAK

Peran Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan
(Studi Kasus Masyarakat Nelayan Desa Bajo
Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan)

Abdullah Soleman

Universitas Terbuka

soleman mmps2@yahoo.co.id

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: (1) Peranan PEMP dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir di Desa Bajo Kabupaten Halmahera Selatan (2) Efektifitas pelaksanaan PEMP dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir dan (3) Strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan dalam pengelolaan wilayah pesisir di Desa Bajo Kabupaten Halmahera Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya bantuan PEMP bagi masyarakat nelayan sangat bermanfaat dan dapat membantu kelancaran usaha mereka, hal ini sesuai dengan salah satu tujuan program PEMP yaitu membantu usaha ekonomi masyarakat pesisir. Dampak Program PEMP terhadap tingkat pendapatan masyarakat adalah: (a). Belum adanya kesesuaian secara penuh antara program dengan pelaksanaan,terlihat dari adanya beberapa kasus yang muncul dalam pelaksanaan: (b).Produktivitas usaha perikanan termasuk dalam kategori sedang yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan produksi, namun belum optimal dalam pemanfaatannya: (c).Dampak program terhadap peningkatan pendapatan belum maksimal sesuai yang diharapkan. Strategi yang paling tepat bagi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan adalah memaksimalkan potensi ekonomi rakyat, yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga produktivitas sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan. Dengan demikian, rakyat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis.

Kata Kunci : *Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, Pendapatan Nelayan*

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

10/40462.pdf

ABSTRACT

The Role Society Economics Empowerment Coastal Program
in Increasing Fisherman Income
(Case Study in Civil Fisherman Society in Bajo Village
Bacan's District, South Halmahera's Regency)

Abdullah Soleman

Universitas Terbuka

soleman mmps2@yahoo.co.id

The objectives of the research were analyzing : (1) the role of Economic Empowerment of Coastal Community (PEMP) for the agenda of increasing earnings of coastal Communities in Bajo Village South Halmahera's Regency (2) the Effectiviness execution of PEMP for the agenda of improving income in coastal area society and (3) the strategy empowerment of fisherman society economics in managing of coastal area region in Bajo's Village, South Halmahera's Regency

Research result indicated that, the PEMP was very useful for fisherman society and can assist their work. This is in accordance with one of the objectives of PEMP. That will be boosted the economics of coastal communities. Impacts of the PEMP. Program to the level society was: (a) there was no conformity between the execution of the program and the planning of the program itself. It can be seen from the existence of some cases which emerge in the process; (b) productivity of the fishery was in the medium category, that were indicated by the increase of the pruduct, but not optimal in utilization; (c) impact of the program to increase revenue was not maximized and expected. Most precise strategy for enableness of economics society fisherman was to maximize the economic potencies of people, that's instructed to improve people productivity. Hence, productivity of human resource and natural resource around people can be improved. Thereby, society and environment could get and add economic value participatively

Key word: *Program Societal, fisherman's income fisherman, society economic Empowerment Coastal program.*

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

10/40462.pdf

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

Judul TAPM	: Peran Program Pemberdayaan ekonomi Masyarakat Pesisir Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Desa Bajo Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan)
Penyusun TAPM	: Abdullah Soleman
NIM	: 014629601
Program Studi	: Magister Ilmu Kelautan bidang minat Manajemen Perikanan

Menyetujui :

Pembimbing II,	Pembimbing I,
Dr.Lina Warlina, M.Ed	Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si
NIP.19610107 198601 001	Nip. 19680911 199404 1 001

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu/ Program Magister Ilmu Kelautan,	Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka
Dra. Agnes P.Sudarmo, MA	Prof. Dr. H. Udin S.Winataputra, MA
NIP. 19631007 198903 2 001	NIP. 19451007 197302 1 001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS TERBUKA PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

10/40462.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU KELAUTAN
BIDANG MINAT MANAJEMEN PERIKANAN

PENGESAHAN

Nama : Abdullah Soleman

NIM : 014629601

Program Studi : Magister Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan

Judul TAPM : Peran Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Desa Bajo Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan)

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Pasca Sarjana, Program Study Magister Manajemen Perikanan, Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Sabtu/17 juli 2010
Waktu : 120 menit
dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji
Nama : Surachman Dimyati, Ph.D .....

Penguji Ahli
Nama : Prof.Dr.Ir.Mulyono S.Baskoro .....

Pembimbing I
Nama : Prof.Dr.Muhajir K.Marsaoly, M.Si .....

Pembimbing II
Nama : Dr.Lina Warlina, M.Ed .....

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

10/40462.pdf

KATA PENGANTAR

Alhamdulilahirobbil'Alamin penulis dapat menyelesaikan TAPM dengan judul : Peran Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan (Studi Kasus Masyarakat Desa Bajo Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan). TAPM ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka, UPBJJ Ternate Maluku Utara.

Sehubungan dengan itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Muhajir K Marsaoly, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Dr.Lina Warlina, M.Ed, selaku pembimbing II yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyusunan TAPM ini.
2. Bapak Prof.Dr.Ir.Mulyono S.Baskoro, selaku penguji ahli dan Bapak Surachman Dimyati, Ph.D selaku ketua komisi penguji yang telah memberikan arahan dalam penyempurnaan TAPM ini.
3. Direktur Pascasarjana Universitas Terbuka Bapak Prof. Dr. H. Udin S.Winataputra, MA, Ketua Program Magister Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan, Kepala UPBJJ-Ternate Bapak Ir. Mulyadi, M.Si beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk mengikuti Program Magister (S2) pada Universitas Terbuka.
4. Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Bapak Dr. H.Muhammad Kasuba, MA dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

10/40462.pdf

Selatan Bapak Djamal Iskandar Alam, S.Sos yang telah memberikan izin belajar kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Program S2 Universitas Terbuka UPBJJ-Ternate.

5. Ketua LEPP-M3 Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Bapak Badri Baba, Habib Assagaf dan Hamdan Alkatiri selaku Tokoh Nelayan, teman-teman nelayan di Desa Bajo yang telah menjadi informan dan responden selama penulis melakukan kegiatan penelitian.
6. Rekan-rekan se kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Idham, Syamsuddin Hamsah, Irwan, Abd. Rahman, Hesty, Aisah, Anti, Nadjib, Rajiman, Haris serta Semua pihak yang telah memberi dorongan dan bantuan sehingga tersusunnya TAPM ini .

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan setulus-tulusnya kepada Almarhum Ayahanda Soleman Adam dan Ibunda Hj Timan Iskandar Alam yang telah membesarkan penulis dengan doa restu, kasih sayang dan cinta sehingga mendukung keberhasilan studi penulis hingga ke jenjang ini.

Penghargaan yang setulus-tulusnya dan ucapan terimakasih kepada Istri tercinta dan tersayang Warda Umar, S.SiT atas segala pengertian, motivasi, doa serta pengorbanan yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi, Kepada Ananda tersayang Ibnu Munzar, M.Syahrawi dan Al-Qindi yang merupakan sumber motivasi, bagi penulis hingga studi ini selesai. Akhirnya semoga TAPM ini dapat dapat bermanfaat bagi yang kita semua.....Amin.

Ternate, 17 Juli 2010

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

10/40462.pdf

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR ORIGINALITAS	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Kajian Teoritik	
1. Tinjauan Umum Wilayah Pesisir	5
2. Masyarakat Nelayan	9
3. Pembangunan Keluarga Sejahtera	12
4. Kelembagaan Ekonomi Rakyat	14
5. Pendapatan Masyarakat Nelayan	15
6. Kelompok Petani Nelayan Kecil	17
7 Kemiskinan dan Kesenjangan	27
8. Efektifitas Program PEMP	34

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

10/40462.pdf

B. Kerangka Pikir..... 36
C. Definisi Operasional..... 39
BAB III. METODELOGI PENELITIAN..... 41
A. Desain Penelitian..... 41
41
B. Populasi dan Sampel..... 42
C. Instrumen Penelitian..... 42
D. Prosedur Pengumpulan Data..... 43
E. Metode Analisa Data..... 49
BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN..... 49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 49
1. Keadaan Fisik Wilayah..... 55
2. Masyarakat Nelayan Desa Bajo..... 63
63
66
B. Peranan PEMP Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Pesisir..... 70
1. Program PEMP..... 72
2. Program PEMP di Maluku Utara.....
3. Mekanisme Program PEMP.....
83
C. Efektifitas Pelaksanaan PEMP Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pesisir..... 95
95
96
D. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Dalam Meningkatkan Tingkat Kesejahteraannya Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Desa Bajo Kabupaten Halmahera Selatan..... 97
100

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

10/40462.pdf

Halaman

Tabel 3.1	Analisis Strategi Faktor Internal……..	46
Tabel 3.2	Analisis Strategi Faktor eksternal…….....	47
Tabel 3.3	Model Matriks SWOT.....	48
Tabel 4.1	Keadaan Rumah Penduduk Desa Bajo……....	49
Tabel 4.2	Mata Pencaharian Penduduk Desa Bajo.....	51
Tabel 4.3	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Bajo.....	52
Tabel 4.4	Jenis dan Jumlah Fasilitas dan Pusat Pelayanan.....	53
Tabel 4.5	Perkembangan Jumlah Armada Penangkapan Ikan Desa Bajo……..	54
Tabel 4.6	Presentasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Nelaya Penerima PEMP yang dikucurkan di Desa Bajo……..	71
Tabel 4.7	Tingkat Pendapatan Nelayan Penerima Bantuan PEMP….....	80
Tabel 4.8	Hasil Skor Faktor Strategi Internal……..	84
Tabel 4.9	Hasil Skor Faktor Strategi Eksternal……	85
Tabel 4.10	Tabel Interaksi antara Faktor Ekternal dan Internal ……	88

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

10/40462.pdf

DAFTAR GAMBAR

.		Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir.....	38
Gambar 3.1	Peta Lokasi Penelitian.....	41
Gambar 4.1	Mekanisme Program PEMP	70

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR LAMPIRAN

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

10/40462.pdf

.

Halaman

Lampiran 1. Tabulasi dan Kisi-kisi Kuisioner 100

Lampiran 2. Nama-nama Informan yang diwawancarai..... 101

Lampiran 3. Transkrip Hasil Wawancara..... 102

Lampiran 4. Gambar Alat Tangkap Ikan di Maluku Utara..... 103

Lampiran 5. Dokumentasi..... 104

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

10/40462.pdf

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Maluku utara adalah salah satu dari sekian daerah di Indonesia yang juga ditetapkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan untuk memperoleh Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), pilihan tersebut didasarkan pada beberapa alasan mendasar diantaranya sebagi berikut : pertama, Maluku Utara memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan rata-rata 60-70%. Kedua, mayoritas masyarakat Propinsi Maluku utara bertempat tinggal di daerah pesisir dan bermata pencaharian sebagai nelayan yang keadaannya masih tergolong miskin dan tertinggal.

Program PEMP tersebut dilaksanakan sejak tahun 2000 di 14 propinsi termasuk Maluku Utara. Program PEMP dilaksanakan dengan dua aspek pemberdayaan yaitu 1) sasaran antara (Koperasi LEPP-M3/Koperasi Perikanan) dan 2) sasaran akhir yaitu masyarakat pesisir dengan usaha skala mikro yang berorientasi pada sektor usaha kelautan dan perikanan seperti kegiatan penangkapan, budidaya, perniagaan hasil perikanan, pengolahan ikan, usaha jasa perikanan, serta pengelolaan wisata bahari, dan berlokasi di daerah sekitar pesisir dan pulau-pulau kecil.

Tujuan dari Program PEMP adalah untuk meningkatkan pendapatan petani nelayan kecil sehingga mereka mampu menggali potensi yang dimiliki. Diharapkan mereka mampu mengangkat kepercayaan diri baik harkat dan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

martabat akibat himpitan ekonomi yang sangat besar, sekaligus membantu petani nelayan kecil dapat mengubah perilakunya agar menjadi tanggap terhadap pembaharuan, mandiri dan sejahtera.

Desa Bajo Kabupaten Halmahera Selatan merupakan salah satu lokasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Provinsi Maluku Utara. Kabupaten Halmahera Selatan terbentuk sesuai dengan Undang–undang nomor 1 tahun 2003. Desa ini merupakan Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Maluku Utara dengan luas wilayah hukum yaitu ± 40.263,72 km² yang terdiri dari daratan 8.779,32 km² (22%) dan laut 31.484,40 km² (78%) dengan panjang garis pantai 2.394,612 Km, dengan jumlah desa 249, serta jumlah penduduk 189.406 jiwa (BPS Halmahera Selatan, 2008). Berdasarkan hal itu, sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu sektor utama bagi pembangunan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya alam dan jasa kelautan (DKP Halmahera Selatan, 2008).

Selanjutnya dikatakan bahwa pekerjaan sebagai nelayan mendominasi pekerjaan utama penduduk Desa Bajo Kabupaten Halmahera Selatan. Sementara itu ada juga nelayan yang masih atau bahkan mengandalkan kegiatan ekonomi di luar sektor perikanan sebagai mata pencaharian. Mereka masing-masing adalah nelayan sambilan utama dan nelayan sambilan tambahan. Kondisi kelompok masyarakat yang mendiami Desa Bajo ini umumnya masih hidup dibawah garis kemiskinan.

Melalui program PEMP yang merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka pemberdayaan ekonomi produktif yang berbasis pada penguatan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kelembagaan memiliki usaha skala mikro dengan program ini diharapkan akan terfokus pembinaan yang dilakukan terhadap kelompok nelayan kecil yang potensial, sehingga dapat berkembang, baik dari segi sumberdaya manusia, organisasi (Koperasi Perikanan) permodalan maupun dari segi usahanya.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir melalui PEMP khususnya di Desa Bajo Kabupaten Halmahera Selatan, maka efektifitas pelaksanaan program tersebut sangat penting artinya. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan PEMP maka perlu dilakukan penelitian tentang "Peranan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pesisir di Desa Bajo Kabupaten Halmahera Selatan".

UNIVERSITAS TERBUKA

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka masalah penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan PEMP dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir khususnya di desa Bajo yang menjadi fokus penelitian.
2. Bagaimana efektifitas pelaksanan PEMP dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir.
3. Bagaimana strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan dalam pengelolaan wilayah pesisir di Desa Bajo Kabupaten Halmahera Selatan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dilaksanakan adalah untuk menganalisis :

1. Peranan PEMP dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir di Desa Bajo Kabupaten Halmahera Selatan
2. Efektifitas pelaksanaan PEMP dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir.
3. Strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan dalam pengelolaan wilayah pesisir di Desa Bajo Kabupaten Halmahera Selatan

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian di dimaksudkan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam mengefektifkan pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah untuk mengkaji program PEMP selanjutnya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik

1. Tinjauan Umum Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir merupakan ekosistem yang unik mengingat pada wilayah ini terjadi interaksi antara ekosistem daratan dan ekosistem lautan. Secara sosio-ekonomi wilayah ini merupakan wilayah yang sangat potensial dari kandungan sumber daya alamnya baik yang bersifat biotik (ikan, kayu, mangrove) maupun abiotik seperti lahan (Bengen, 2001).

Wilayah pesisir juga merupakan tempat yang penting bagi berbagai aktivitas manusia, baik sebagai tempat aktivitas sosial, ekonomi maupun politik. Aktivitas-aktivitas itu pada umumnya sangat dipengaruhi dan tergantung pada karakteristik wilayah pesisir tersebut. Populasi manusia yang hidup di wilayah pesisir cenderung terus meningkat. Keadaan ini akan menyebabkan tekanan terhadap wilayah pesisir akan meningkat juga. Hubungan antar manusia dengan wilayah pesisir sangat kompleks, dimana masing-masing mempunyai kekuatan untuk saling mempengaruhi dengan lainnya.

Menurut Sugiarto (1976), Indonesia mendefinisikan wilayah pesisir sebagai daerah pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat air laut seperti pasang, angin laut, perembesan air

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

asin. Ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Selain itu, wilayah pesisir juga merupakan daerah pertemuan antara darat, laut dan udara. Dengan demikian, pantai dipandang sebagai zona percampuran atau perbatasan yang berpengaruh terhadap ruang dimana lingkungan daratan berpengaruh terhadap lingkungan laut dan sebaliknya dapat mengalami perubahan, baik pertambahan areal daratan akibat sedimentasi maupun pengurangan areal karena abrasi (dalam rentang waktu dan kondisi tertentu).

Definisi wilayah pesisir dalam pengertian ekosistem yang dianut oleh IGBP–ICSU (*International Geosphere Biosphere Program–International Council of Scientific Union*) bahwa kawasan pesisir adalah suatu zona yang ke arah darat dibatasi sampai dimana pengaruh darat masih ada. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa dalam konsep MREP digunakan istilah pesisir dan wilayah pesisir masing-masing untuk *coast* dan *coastal zone* dalam pengertian keruangan, sedangkan pantai adalah pengertian fisik, yang di dalam bahasa Inggris disebut *costline* bukan *beachline*, karena pantai digambarkan sebagai garis dalam peta dan dapat dihitung panjangnya (Bengen, 2001)

Perairan pantai (pesisir) dapat diartikan sebagai wilayah peralihan antara darat dan laut. Ke arah laut di batasi oleh wilayah laut, dan ke arah darat dibatasi oleh wilayah daratan. Belum ada kesepakatan resmi di dunia berapa jarak antara batas wilayah pantai ke laut maupun ke darat. Beberapa

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

negara membuat batas wilayah pantai laut dan di darat berbeda, bergantung pada tujuan pengelolaan, sifat lingkungan pantai, jenis sumber daya pantainya, serta sistem pemerintahannya. Batas wilayah pantai yang banyak digunakan adalah batas administrasi daerah, batas wilayah politik negara, bentuk fisik pantai, unit-unit ekologi, dan batas tidak tetap (*arbitary*) (Bengen, 2001).

Wilayah pesisir juga merupakan wilayah yang potensial bagi segala penggunaan, baik sebagai kawasan perikanan, hutan payau, industri hingga kawasan untuk pariwisata. Perubahan fungsi lahan di wilayah pesisir menyebabkan perubahan nilai ekonomis. Fungsi ekonomi inilah yang diharapkan diikuti oleh efek ganda (*multiplier effect*), yaitu berkembangnya kegiatan lain yang berkaitan langsung maupun tidak dengan kegiatan ekonomi utama (LPPM - UNHAS, 2001).

Carter (1988) mengatakan bahwa kawasan pesisir adalah suatu ruang dimana lingkungan *teresterial* yang mempengaruhi lingkungan *marine* dan sebaliknya. Lingkungan tersebut dicirikan oleh variabel yang sangat luas, yang dapat berubah dalam waktu tertentu. Kawasan pesisir merupakan wilayah peralihan antara daratan dan perairan laut, yang secara geografis didefinisikan sebagai wilayah antara garis pantai hingga ke arah daratan yang masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut dengan lebar yang ditentukan oleh kelandaian pantai dan dasar laut, serta dibentuk oleh dedepan lempeng hingga pasir yang bersifat lepas dan kadang materinya berupa kerikil. Menurut Dahuri *et. al* (2001) wilayah pesisir didefinisikan sebagai suatu wilayah perairan antara daratan dan lautan apabila ditinjau dari garis pantai (*coosthine*), maka

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas, yaitu batas yang sejajar batas pantai (*laugshore*) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (*cross-shore*).

Dari sudut pandang pemberdayaan sumberdaya, definisi kawasan pesisir harus mencakup fungsi-fungsi ekosistem sekaligus jenis kegiatan manusia yang memanfaatkan lingkungan tersebut (Idrus, 2003). Batasan titik wilayah pesisir memang beragam dan akan tergantung pada rezim pengelolaan wilayah dan sumberdaya yang hendak diinfestasikan. Karena banyaknya sumberdaya yang didukung wilayah pesisir serta ke aksebilitas yang mudah, maka kawasan ini umumnya merupakan tempat konsentrasi pemukiman penduduk serta segenap aktifitasnya dalam memanfaatkan sumberdaya yang sebesar-besarnya.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat pula diartikan bahwa kawasan pesisir merupakan daerah yang sangat kompleks, beragam, dinamis, subur dan produktif. Kawasan ini penduduk cenderung memanfaatkan sumberdaya wilayah pesisir secara intensif, baik modal maupun teknologi tanpa memperhatikan kelestarian sumberdaya. Untuk itu dalam pengelolaan wilayah pesisir harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi budaya dan aspirasi masyarakat pengguna kawasan pesisi *(stakeholders)* (Dahuri *et al.* 2001).

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2. Masyarakat Nelayan

Mattulada (1997), mengatakan bahwa masyarakat pesisir adalah sekelompok manusia yang hidup bekerjasama di suatu daerah tertentu yang disebut pantai. Sementara itu orang yang bertempat tinggal di pesisir pantai dan mempunyai mata pencaharian pokok sebagai penangkap ikan dan hasil laut lainnya disebut nelayan.

Selain itu Sunarto (1993), masyarakat nelayan adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan, sehingga setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu kesatuan manusia menjadi satu masyarakat adalah pola tingkah laku yang khas mengenai semua faktor kehidupan dalam batas-batas kesatuannya termasuk mata pencahariannya.

Dengan demikian masyarakat Nelayan Provinsi Maluku Utara adalah kelompok masyarakat yang tinggal dan menetap di pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Maluku Utara dan berprofesi sebagai nelayan.

Satria (2002), menjelaskan bahwa secara sosiologis, karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris seiring dengan perbedaan karakteristik sumberdaya yang dihadapinya.

Masyarakat agraris yang direpresentasikan kaum petani menghadapi sumberdaya yang terkontrol, yaitu pengelolaan lahan untuk produksi suatu komoditas dengan *output* yang relatif dapat diprediksi sehingga mobilitas usaha yang terjadi relatif rendah dan elemen resiko tidak terlalu besar. Hal ini

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

berbeda jauh dengan karakteristik masyarakat nelayan, yang menghadapi sumberdaya yang hingga saat ini masih bersifat *open access*.

Karakteristik sumberdaya seperti ini menyebabkan nelayan harus berpindah-pindah untuk memperoleh hasil maksimal dan konsekuensi yang harus diterima dari mekanisme ini adalah elemen risiko yang sangat tinggi karena lebih bersifat spekulatif (*gambling*) sehingga menyebabkan masyarakat nelayan memiliki karakter keras, tegas, dan terbuka.

Berdasarkan karakteristik human system dalam tipologi fishery system seperti yang disampaikan oleh Charles (2001), terdapat beberapa karakteristik umum dari nelayan (fishers) yaitu bahwa pertama, nelayan berbeda menurut latarbelakang sosial seperti tingkat umur, pendidikan, status sosial dan tingkat kohesitas dalam komunitas mikro (antar nelayan dalam satu grup) atau dalam komunitas makro (nelayan dengan anggota masyarakat pesisir lainnya). Kedua, dalam komunitas nelayan komersial, nelayan dapat bervariasi menurut *occupational commitment*-nya seperti nelayan penuh, nelayan sambilan utama dan nelayan sambilan, atau menurut *occupational pluralism*-nya seperti nelayan dengan spesialisasi tertentu, nelayan dengan sumber pendapatan beragam, dan lain sebagainya. Ketiga, nelayan dapat bervariasi menurut motivasi dan perilaku dimana dalam hal ini terdiri dari dua kelompok yaitu nelayan dengan karakteristik *profit-maximizers* yaitu nelayan yang aktif menangkap ikan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan cenderung berperilaku seperti layaknya "perusahaan", dan kelompok nelayan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

satisficers atau nelayan yang aktif menangkap ikan untuk mendapatkan penghasilan yang cukup.

Masyarakat nelayan ditinjau dari aspek ekonomi memiliki stratifikasi sebagai berikut: (1) nelayan kaya yang mempunyai kapal yang mempekerjakan nelayan lain sebagai tenaga kerja dia sendiri ikut bekerja; (2) nelayan kaya yang mempunyai kapal tetapi ia sendiri masih ikut bekerja sebagai awak kapal; (3) nelayan sedang yang kebutuhan hidupnya dapat ditutupi dengan pendapatan pokoknya dari bekerja sebagai nelayan, dan mempunyai perahu tanpa mempekerjakan tenaga dari luar keluarga; (4) nelayan miskin yang pendapatan dari perahunya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga harus ditambah dengan bekerja lain untuk kebutuhannya beserta istri dan anaknya; (5) nelayan pendega atau nelayan sawi yang tidak mempunyai perahu, sehingga kebutuhan hidupnya dipenuhi dengan bekerja sebagai awak kapal.

Definisi mengenai masyarakat itu lebih dibatasi lagi tentang masyarakat yang mempunyai kebudayaan sangat spesifik yakni kebudayaan masyarakat nelayan. Kebudayaan masyarakat nelayan erat hubungannya dengan suatu orientasi terhadap laut. Suatu orientasi meliputi sikap ataupun pengetahuan, aktual (Nashimura, 1973). Dapatlah dikatakan bahwa masyarakat mempunyai orientasi untuk mempertahankan hidup pada sumberdaya laut dengan 7 unsur kehidupan yang dimiliki atau kesadaran akan kondisi lingkungan, sosial, budaya, adalah tipe-tipe atau karakter budaya masyarakat nelayan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pada dasarnya, penggolongan sosial dalam masyarakat nelayan dapat ditinjau dari tiga sudut pandang. Pertama, dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jaring dan perlengkapan lain), struktur masyarakat nelayan terbagi kedalam kategori nelayan pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh. Nelayan buruh tidak mempunyai alat-alat produksi dan dalam kegiatan produksi sebuah unit perahu, nelayan buruh hanya menyumbangkan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak secara terbatas. Dalam masyarakat pertanian, nelayan buruh identik dengan buruh tani.

Kedua, ditinjau dari tingkat skala investasi modal usahanya, struktur masyarakat nelayan terbagi kedalam kategori nelayan besar dan nelayan kecil. Disebut nelayan besar karena jumlah modal yang diinvestasikan dalam usaha perikanan relatif banyak, sedangkan pada nelayan kecil justru sebaliknya. Ketiga, dipandang dari tingkat teknologi peralatan tangkap yang digunakan, masyarakat nelayan terbagi kedalam kategori nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dibandingkan nelayan tradisional (Kusnadi, 2002).

3. Pembangunan Keluarga Sejahtera

Penduduk dalam segala potensi yang dimiliki merupakan salah satu modal dan sumberdaya manusia yang produktif bagi pembangunan nasional disegala bidang, apabila berkembang dalam kualitas memadai, dan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Keadaan penduduk yang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

demikian merupakan unsur bagi ketahanan nasional. Perhatian pemerintah terhadap penduduk semakin menonjol, penduduk tak sekedar dipandang sebagai faktor produksi bersama dengan faktor produksi lain dalam menghasilkan barang atau jasa, tetapi dipandang sebagai produsen, konsumen, sumber pemikiran dan sumber motivasi pembangunan (Mosher, 1995).

Sejalan dengan komitmen terhadap pentingnya penduduk bagi pembangunan, keluarga sebagai masyarakat terkecil juga dirasakan menjadi penting. Keluarga mempunyai peranan yang sangat besar dalam menanamkan nilai-nilai yang ada dimasyarakat. Dengan peran yang demikian strategis, jika keluarga dipersiapkan dengan baik akan menjadi institusi pembangunan yang sangat vital.

Di negara yang sedang berkembang yang dicirikan pada daerah agraris, umumnya bank komersial merupakan sumberdana kredit utama untuk kegiatan pertanian. Sudah sejak dulu bank yang menaruh perhatian terutama dalam penanganan bidang non pertanian, kalaupun kredit pertanian dari bank komersial hanya kepada pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Oleh sebab itu dalam rangka memperlunak ketaatan bank komersial dalam pemberian kredit kepada nelayan kecil atau untuk menimbulkan perhatian bank terhadap kegiatan ini, sering bank sentral mengeluarkan dana lunak (*discount fund*). Dengan dana lunak ini bank komersial dapat membiayai kembali kredit dalam bidang pertanian, juga sering diperlukan dana pinjaman khusus untuk menunjang resiko kredit (Tcondronegoro & Becthol, 1998).

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

4 Kelembagaan Ekonomi Rakyat

Kelembagaan masyarakat di pedesaan umumnya terbentuk melalui dua tahap, yaitu berawal dari; 1) Ikatan sosial (*sosial relation*), antara anggota masyarakat yang masih kuat. Hubungan ini menciptakan kesepakatan, aturan dan kewajiban sosial (*social obligation*) masyarakat di pedesaan yang mengikat semua anggota. Di beberapa daerah, peran dari lembaga adat seperti *banjar ninik mamak* dan lembaga adat lainnya masih cukup dominan. Sejalan dengan berkembangnya kegiatan sosial dan tingkat kebutuhan masyarakat, maka hubungan dan kewajiban sosial seperti itu mengalami pergeseran secara bertahap; (2). Hubungan ekonomi (*economic relation)* bahwa setiap pertukaran barang dan pelayanan jasa selalu memperhitungkan imbalan ekonomi dan selalu dikaitkan dengan perhitungan perhitungan untung rugi. Hubungan ekonomi antar golongan masyarakat kemudian berkembang menjadi kewajiban ekonomi *(economic obligation*) dengan berbagai aturan yang bersifat lebih baku dan lebih mengikat semua anggota masyarakat di pedesaan. Oleh karenanya setiap anggota masyarakat di pedesaan secara bertahap di tuntut untuk bersikap nasional.

Para ahli berpendapat bahwa lembaga dapat diartikan, sebagai suatu norma/kaidah peraturan atau organisasi yang memudahkan koodinasi dalam bentuk harapan dan masing-masing yang mungkin dapat dicapai dengan saling bekerjasama. Dalam hal ini kelembagaan yang dimaksudkan adalah tradisi dan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pranata baru yang sesuai dengan tuntutan pemberdayaan dan modernisasi maupun organisasi kelompok yang mampu menghasilkan beragam produk yang dapat mengembangkan keunggulan kooperatif (*comparative advance*) atau keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) (Cornelis, 2005).

5. Pendapatan Masyarakat Nelayan

Secara ekonomis seseorang dikatakan semakin sejahtera jika pendapatan ril atau nyata semakin meningkat, sehingga kebutuhan hidupnya semakin banyak yang terpenuhi. Pendapatan pribadi dapat diartikan sebagai semua jenis pendapatan, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yng terinci dari penduduk suatu negara (Suklino, 1981).

Pendapatan didefinisikan sebagai penghasilan yang berupa upah/gaji, bunga, sewa, deviden, keuntungan dan merupakan suatu arus yang diukur dalam waktu tertentu (Kadariah, 1981). Pendapatan menurut Budiono (1982), mengemukakan bahwa pendapatan atau *income* seseorang adalah hasil penjualan faktor-faktor produksi yang dimilikinya.

Pendapatan menurut Soekartawi (1986), adalah selisih antara penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan selama melakukan usahanya. Sudarsono (1998), mengemukakan bahwa pendapatan petani adalah pendapatan yang diterima oleh petani yang terdiri atas pendapatan kotor dalam memimpin usaha taninya termasuk biaya dari keluarga sendiri yang dipergunakan untuk usaha taninya. Selanjutnya Sayogyo (1983) menyatakan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

bahwa ragam pekerjaan rumah tangga yang menjadi sumber pendapatan, meliputi pekerjaan rumah usaha tani, pekerjaan-pekerjaan yang menjadi sumber pendapatan tersebut tentunya akan melibbatkan tenaga kerja pria, wanita, bahkan tidak jarang melibatkan tenaga kerja anak-anak.

Nawir (1983) mengatakan bahwa untuk mencapai laba besar maka manajemen dapat melakukan langkah-langkah seperti menekan biaya operasi serendah mungkin dengan mempertahankan tingkat harga penjualan yang ada, menentukan harga jual sedemikian rupa sesuai dengan laba yang dikehendaki dan meningkatkan volume penjualan sebesar mungkin. Untuk mendapatkan laba yang maksimum beberapa alternatif cara dapat dicapai, baik ditempuh secara sendiri-sendiri, maupun dengan serentak sekaligus. Diantara cara yang lazim dipakai adalah dengan meminimalkan biaya dan atau memaksimalkan pendapatan, pejualan atau *reveneu*.

Menurut Wahyu (1995), bahwa untuk meningkatkan pendapatan dalam rangka menanggulangi kemiskinan, tidak lain adalah upaya pemberdayaan (*empowering*) orang miskin yang dilaksanakan melalui suatu proses pendidikan yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip menolong diri sendiri (*self-help*) dan berlandaskan pada peningkatan kemampuan menghasilkan pendapatan (*income generating capacity).* Sehingga mereka mampu menjangkau atau mengakses terhadap 1) sumberdaya 2) permodalan, 3) teknologi dan 4) pasar. Keempat kemampuan ini, harus benar-benar mereka miliki secara utuh tidak parsial, agar kegiatan mereka dibidang ekonomi berjalan secara berkelanjutan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Di dalam usaha petani kecil, sebagian besar bangga karena tenaga kerja berasal dari keluarga petani sendiri yang terdiri dari ayah sebagai kepala keluarga, istri dan anak-anak petani. Kesemua tenaga kerja tersebut termasuk anak yang berumur 12 tahun dapat ikut aktif pada kegiatan produksi yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan keluarga petani tersebut (Mubyarto, 1984). Selanjutnya Suroso (1996), menyatakan bahwa untuk lebih meningkatkan pendapatan petani kecil dapat dicapai melalui pemanfaatan waktu yang tersedia dari tenaga kerja yang ada. Demikian pula dikatakan oleh Nurohmansyah (2000), bahwa dengan pemanfaatan waktu yang tersedia menunjukan adanya pengaruh signifikan dari jam kerja efektif dengan peningkkatan pendapatan petani yang berarti bahwa penambahan jam kerja efektif dari petani dapat meningkatkan pendapatannya.

6. Pemberdayaan Kelompok Petani Nelayan Kecil

Ketimpangan pembangunan yang dilakukan selama ini berimplikasi kepada terjadinya distribusi pendapatan yang tidak merata antara kelompok kaya dan miskin yang sebagian besar bermukim di pedesaan, yang berarti kemiskinan relatif. Dengan bertambahnya kemiskinan relatif membawa masalah yang sangat menonjol dimana perlu penanganan bila ingin mewujudkan kemakmuran merata.

Masalah kemiskinan pedesaan (*rural proverty*) tidak mungkin dilepaskan dari masalah pembangunan pedesaan. Masyarakat pedesaan yang hidupnya dalam kelompok kecil disebut kelompok petani nelayan kecil, dimana rata-rata mereka hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pendapatannya setara dengan 320 Kg beras per kapita per tahun (Mubyarto, 1987).

Tidak adanya akses kesumber modal, teknologi pasar dan sarana prasarana yang terbatas seperti pusat pendaratan ikan dan tempat pelelangan ikan serta rendah partisipasi dalam pengelolaan sumberdaya alam adalah alasan-alasan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Alasan lain terkait dengan sifat dari sumberdaya pesisir sendiri yang memungkinkan sehingga kemiskinan bisa hidup subur. Kemiskinan terjadi disamping disebabkan oleh dampak pembangunan atau dampak *eksternalitas* kegiatan di daerah daratan yang berhubungan langsung dengan pesisir. Kemiskinan juga disebabkan karena faktor-faktor sosial seperti tingginya pertumbuhan jumlah penduduk, rendahnya tingkat pendidikan, dan berkembangnya kriminalitas.

Kemiskinan yang menyelimuti kelompok masyarakat ini membuat mereka kian terpuruk dan tidak berdaya sehingga semakin jatuh ke dalam lembah kemiskinan. Penderitaan yang berkepanjangan diperparah dengan krisis keuangan global yang melanda bangsa ini. Bila dilihat dari potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang dimiliki, seharusnya masyarakat pesisir umumnya dan nelayan khususnya merupakan kelompok masyarakat maju bila dibandingkan dengan kelompok lainnya. Kenyataannya malah berbanding terbalik dengan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang dimiliki dan belum dimanfaatkan secara optimal.

Banyak faktor yang menyebabkan kurang optimalnya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia. Dalam perspektif kebijakan,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

upaya pembangunan sektor kelautan dan perikanan baru kembali menjadi salah satu kebijakan sejalan dengan reformasi pemerintah tahun 1998. sebelumnya. Kebijakan pembangunan lebih dititikberatkan pada pembangunan dan pendayagunaan sumberdaya berbasis daratan. Di samping itu pembangunan kelautan dan perikanan dimasa lalu dilaksanakan melalui pendekatan yang bersifat sentralistik (*top down*) dan parsial sehingga seringkali kurang atau bahkan tidak mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat lokal. Demikian pula dalam implementasinya yang kurang mendayagunakan sumberdaya lokal.

Program pembangunan ekonomi, pendapatan, tingkat hidup dan mutu kehidupan masyarakat yang dilakukan pemerintah mencari aneka rupa upaya yang lebih efektif, baik dengan pendapatan dari atas maupun dari bawah termasuk didalamnya program peningkatan pendapatan petani nelayan kecil yang diperuntukkan bagi kelompok petani nelayan kecil yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan sehingga dapat melampaui garis kemiskinan untuk mencapai taraf hidup yang lebih layak dan sejahtera, adapun kegiaatan pokoknya adalah (Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara, 1998).

1. Menumbuhkan, memberi dan meningkatkan kemampuan serta ketrampilan kepada masyarakat pesisir sehingga mereka mampu mengakses permodalan dan mengembangkan kegiatan usaha yang dapat menguntungkan.
2. Membantu pelayanan kredit dan pembinaan kepada petani nelayan kecil termasuk yang telah berasal untuk akses kepada sistem skim kredit komersial biasa

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3. Meningkatkan manajemen partisipatif baik pada segi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi pada semua tingkatan manajemen.

Menurut Makeham (1994) petani Indonesia pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok menurut luas wilayahnya yaitu, (1) Petani mampu yang memiliki lahan 0,5 Ha atau lebih (2) petani kecil atau marginal dengan luas lahan rata-rata dibawah 0,5 Ha dan (3) petani tuna lahan yang hanya memiliki sedikit pekarangan disekitar rumahnya yang sederhana dan kurang sehat.

Selain itu Tohir (1991) membagi petani Indonesia ke dalam 4 kelompok berdasarkan luas usaha taninya yaitu (1) buruh tani, yaitu orang yang memiliki tanah seluas kurang dari 0,1 Ha, (2) petani miskin, yaitu petani yang memiliki luas tanah 0,1-0,5 Ha, (3) petani cukupan, yaitu petani yang memiliki tanah 0,5 Ha, dan (4) petani mampu, yaitu petani memiliki lebih dari 1 Ha.

Petani kecil memiliki peranan yang penting dalam pembangunan pertanian, dan mereka merupakan golongan terbesar dalam kelompok petani di Indonesia, dengan ciri-ciri (1) berusaha dalam lingkungan tekanan penduduk lokal yang meningkat, (2) mempunyai sumberdaya terbatas, sehingga menciptakan taraf hidup yang rendah, (3) bergantung seluruhnya atau sebagian kepada produksi yang subsistem, dan (4) kurang memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan lainnya (Soerkatawi, 1986). Selain ciri tersebut diatas dapat pula ditambahkan ciri-ciri petani kecil yaitu

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

(1) produktifitas tenaga kerja rendah, pengguna tenaga kerja rendah tidak efisien, sehingga pendapatan perkapita rendah dan (2) tingkat keterampilan atau skill rendah.

Konsep pemberdayaan masyarakat secara mendasar berarti menempatkan masyarakat beserta institusi-institusinya sebagai kekuatan dasar bagi pengembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Menghidupkan kembali berbagai pranata ekonomi masyarakat untuk dihimpun dan diperkuat sehingga dapat berperan sebagai lokomotif bagi kemajuan ekonomi merupakan keharusan untuk dilakukan. Ekonomi rakyat akan terbangun bila hubungan sinergis dari berbagai pranata sosial dan ekonomi yang ada didalam masyarakat dikembangkan kearah terbentuknya jaringan ekonomi rakyat.

Dalam rangka mencari solusi masalah ekonomi dan politik serta budaya yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, semua pihak telah memberikan rambu-rambu untuk tidak terjebak membuat 'bungkus baru namun isi lama'. Dari berbagai tawaran alternatifmodel pemberdayaan masyarakat, 'model ekonomi kerakyatan' secara teoritik telah berkembang menjadi wacana baru saat ini. Paradigma pemberdayaan ekonomi rakyat sebenarnya bukan saja berupa tuntutan atas pembagian secara adil aset ekonomi, tetapi juga merupakan keniscayaan ideologis dengan semangat meruntuhkan dominasi-dominasi birokrasi dalam mengatur dan menentukan berbagai bidang kehidupan rakyat (Sasono, 2000). Untuk itu, maka pemberdayaan ekonomi rakyat (dalam penerapan untuk petani dan nelayan kecil) berarti menuju kepada terbentuknya kemandirian petani dan nelayan itu,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

yaitu berperilaku efisien, modern dan berdaya saing tinggi. Perilaku efisien artinya berpikir dan bertindak serta menggunakan sarana produksi secara tepat guna atau berdaya guna. Berperilaku modern artinya mengikuti dan terbuka terhadap perkembangan dan inovasi serta perubahan yang ada. Berdaya saing tinggi yaitu mampu berpikir dan bertindak serta menggunakan sarana produksi atas dasar memperhatikan mutu hasil kerjanya dan kepuasan konsumen yang dilayaninya (Sumardjo, 1999).

Gagasan pemberdayaan ekonomi rakyat menurut Mahmudi (1999) adalah merupakan upaya mendorong dan melindungi tumbuh dan berkembangnya kekuatan ekonomi lokal dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) oleh masyarakat yang berbasiskan pada kekuatan rakyat. Muatan gagasan ini tidak saja diuntut untuk dapat mendayagunakan dan menghasilgunakan potensi sumber daya lokal untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, tetapi juga terlindunginya hak-hak rakyat dalam pengelolaan sumberdaya lokal sesuai dengan kepentingan ekonomi dan sosialnya.

Beberapa pendekatan dan strategi dalam pemberdayaan masyarakat (Kadariah, 1981) menuju kemandirian petani dan nelayan kecil, dapat ditempuh dengan berbagai upaya sebagai berikut :

a. Memulai dengan tindakan mikro dan lokal. Proses pembelajaran rakyat harus dimulai dengan tindakan mikro dan lokal, namun memiliki konteks makro dan global. Dialog mikro–makro harus terus menerus menjadi bagian pembelajaran masyarakat agar berbagai pengalaman mikro dapat menjadi *policy input* dan *policy reform* sehingga memiliki dampak yang lebih luas.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Petugas pemberdayaan /pendamping masyarakat tani dan nelayan kecil seyogyanya diberikan kebebasan untuk mengembangkan pendekatan dan cara yang sesuai dengan rumusan tuntutan kebutuhan setempat/local di wilayah tugasnya masing-masing.

b. Pengembangan sektor ekonomi strategis sesuai dengan kondisi lokal (daerah). Karena masing-masing daerah potensinya berbeda, maka kebijakan yang akan diberlakukan juga berbeda antar daerah. Pemberlakuan kebijakan secara seragam untuk semua daerah harus ditinggalkan.

c. Mengganti pendekatan kewilayahan administratif dengan pendekatan kawasan. pemberdayaan masyarakat tidak mungkin didasarkan atas kewilayahan administratif. Pendekatan kewilayahan administratif adalah pendekatan birokrasi/kekuasaan. Pendekatan kawasan berarti lebih menekankan pada kesamaan dan perbedaan potensi yang dimiliki oleh suatu kawasan tertentu. Dengan pendekatan ini akan memungkinkan terjadinya pemberdayaan masyarakat dalam skala besar dan lebih lanjut akan memungkinkan terjadinya kerjasama antar kawasan yang lebih produktif.

d. Membangun kembali kelembagaan masyarakat. Peranserta masyarakat menjadi keniscayaan bagi semua upaya pemberdayaan masyarakat, jika tidak dibarengi munculnya kelembagaan sosial, ekonomi dan budaya yang benar-benar diciptakan oleh masyarakat sendiri. Misalnya lumbung desa dan organisasi lokal lainnya dipersilahkan tetap hidup.

e. Mengembangkan penguasaan pengetahuan teknis. Perlu dipahami bersama bahwa desakan modernisasi telah menggusur ilmu pengetahuan dan teknologi

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

lokal dan enciptakan ketergantungan masyarakat lokal pada input luar serta hilangnya kepercayaan diri yang sangat serius. Temuan-temuan lokal oleh petani dan nelayan setempat harus mendapatkan pengakuan sejajar dan dipersilahkan bebas berkompetisi dengan inovasi baru dari luar. Pola penyuluhan yang bersifat sentralistik, *topdown* dan linier (Sumardjo, 1998) perlu diubah menjadi pendekatan yang lebih dialogis dan terhadap masalah.

f. Pengembangan kesadaran pelaku ekonomi. Karena peristiwa ekonomi juga merupakan peristiwa politik atau lebih dikenal dengan politik ekonomi, maka tindakan yang hanya ber-orientasi memberikan bantuan teknis jelas tidak memadai. pemberdayaan yang diperlukan adalah tindakan berbasis pada kesadaran masyarakat untuk membebaskan diri dari belenggu kekuatan ekonomi dan politik yang menghambat proses demokratisasi ekonomi. Komitmen para petugas pemberdayaan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait pada pengembangan kemandirian petani dan nelayan kecil merupakan sesuatu yang sangat diperlukan.

g. Membangun jaringan ekonomi strategis. Jaringan strategis akan berfungsi untuk mengembangkan kerjasama dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki kelompok ekonomi satu dengan lainnya baik dalam bidang produksi, pemasaran, teknologi dan permodalan. Salah satu yang sudah waktunya dibangun adalah jaringan infrastruktur telekomunikasi dan sistim informasi pendukungnya yang memanfaatkan seperti internet untuk membuka pintu gerbang seluas-luasnya bagi petani dan nelayan atas informasi yang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

diperlukan bagi pengembangan usahanya (setidaknya melalui mediasi para petugas penyuluh/pendamping pemberdayaan masyarakat).

h. Kontrol kebijakan. Agar kebijakan pemerintah benar-benar mendukung upaya pemberdayaan masyarakat, maka kekuasaan pemerintah harus dikontrol. Sebagai contoh adalah keikutsertaan organisasi petani dan nelayan dalam proses pengambilan keputusan tentang kebijakan pertanian dan perikanan.

Dengan memperhatikan arah tantangan pertanian dan perikanan yaitu seharusnya dikembangkan ke arah agribisnis, maka perlu mendapat penekanan bahwa sasaran strategis pemberdayaan masyarakat bukanlah sekedar peningkatan pendapatan semata, melainkan juga sebagai upaya membangun basis-basis ekonomi yang bertumpu pada kebutuhan masyarakat dan sumberdaya lokal yang handal. Dalam kerangka tersebut, keberhasilan upaya pemberdayaan masyarakat tidak hanya dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan masyarakat melainkan juga aspek-aspek penting dan mendasar lainnya.

Beberapa aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan, antara lain :

a. Pengembangan organisasi/kelompok masyarakat yang dikembangkan dan berfungsi dalam mendinamisir kegiatan produktif masyarakat misalnya berfungsinya HKTI, HNSI , dan organisasi lokal lainnya .

b. Pengembangan jaringan strategis antar kelompok/organisasi masyarakat yang terbentuk dan berperan dalam pengembangan masyarakat tani dan nelayan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

misalnya asosiasi dari organisasi petani dan nelayan, baik dalam skala nasional, wilayah, maupun lokal.

c. Kemampuan kelompok petani dan nelayan kecil dalam mengakses sumber-sumber luar yang dapat mendukung pengembangan mereka, baik dalam bidang informasi pasar, permodalan, serta teknologi dan manajemen, termasuk didalamnya kemampuan lobi ekonomi. Di sinilah maka perlunya ekonomi jaringan dikembangkan. Ekonomi jaringan adalah suatu perekonomian yang menghimpun para pelaku ekomomi, baik dari produsen, konsumen, service provider, equipment provider, cargo, dan sebagainya di dalam jaringan yang terhubung baik secara elektronik maupun melalui berbagai forum usaha yang aktif dan dinamis. Ekonomi jaringan ini harus didukung oleh jaringan telekomunikasi, jaringan pembiayaan, jaringan usaha dan perdagangan, jaringan advokasi usaha, jaringan saling belajar, serta jaringan lainnya seperti hasil temuan riset dan teknologi/inovasi baru, jaringan pasar, infomasi kebijakan dan pendukung lainnya yang dapat diakses oleh semua dan tidak dimonopoli oleh kelompok tertentu (Sasono, 2000).

d. Pengembangan kemampuan-kemampuan teknis dan manajerial kelompok-kelompok masyarakat, sehingga berbagai masalah teknis dan organisasi dapat dipecahkan dengan baik. Di sini, selain masyarakat sasaran (petani dan nelayan), juga para petugas penyuluh/pendamping pemberdayaan masyarakat harus meningkatkan kompetensi diri sebagai petugas yang mampu memberdayakan, karena banyak diantara mereka justru ketinggalan kemampuannya dengan kelompok sasarannya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

7. Kemiskinan dan Kesenjangan

Gambaran umum yang pertama kali bisa dilihat dari kondisi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat nelayan adalah fakta-fakta fisik berupa kualitas pemukiman. Kampung-kampung nelayan miskin akan mudah diidentifikasi dari kondisi rumah hunian mereka. Rumah-rumah yang sangat sederhana; berdinding anyaman bambu , berlantai tanah pasir, beratap rumbia, dan keterbatasan pemilikan perabot rumahtangga adalah tempat tinggal nelayan tradisional. Unit-unit rumah tangga miskin biasanya ditempati oleh beberapa keluarga yang masih berkerabat (Kusnadi, 2002).

Persoalan kemiskinan merupakan persoalan klasik, memiliki kenyataan kompleks serta bersifat multidimensi yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2004 jumlah penduduk miskin mencapai 36,146 juta jiwa (16,66% dari total jumlah penduduk). Berbagai masalah yang dialami masyarakat miskin menunjukkan, bahwa kemiskinan bersumber dari ketidakberdayaan dan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi hak-hak dasar, kerentanan masyarakat menghadapi usaha serta akibat konflik dan tindak kekerasan.

Penyebab lain, lemahnya penanganan masalah kependudukan, ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, dan kesempatan pembangunan yang menyebabkan masih banyak wilayah dikategorikan tertinggal dan terisolasi. Selain itu, masalah kemiskinan juga memiliki spesifikasi yang berbeda antarwilayah pedesaan, perkotaan serta permasalahan khusus di wilayah pesisir dan kawasan tertinggal.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Masalah kemiskinan di Indonesia juga ditandai dengan rendahnya mutu kehidupan masyarakat, yang diindikasikan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM). IPM dan IKM mempunyai komponen yang sama, yaitu angka harapan hidup (tingkat kesehatan), penguasaan ilmu pengetahuan (tingkat pendidikan) dan standar kehidupan yang layak (tingkat ekonomi). Terkait IPM standar hidup layak dihitung dari pendapatan per kapita. Sementara IKM diukur dengan persentase penduduk tanpa akses terhadap air bersih, fasilitas kesehatan dan balita kurang gizi. Pada tahun 2003, IPM Indonesia menduduki peringkat 112 dari 175 negara, sedangkan dalam konteks IKM Indonesia menempati peringkat 33 dari 94 negara.

Strategi menanggulangi kemiskinan harus dipahami bahwa kemiskinan tidak hanya diukur sebatas ketidakmampuan ekonomi. Tapi juga termasuk tidak terpenuhinya hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang. Baik laki-laki maupun perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Hak-hak dasar tersebut, antara lain mencakup pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam sosial ekonomi dan politik baik laki-laki maupun perempuan.

Selain itu, upaya penanggulangan kemiskinan tidak lepas dari penciptaan stabilitas ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pendapatan masyarakat. Secara global, upaya mengurangi kemiskinan telah memperoleh momentum dan toleransi masyarakat global dengan disepakatinya tujuan Millenium Development Goals (MDGs). Hal ini tentu menjadi tanggung jawab bersama. Atau merupakan kewajiban moral dan menjadi amanat konstitusi negara Indonesia, di mana dalam implementasinya tidak hanya ditangani oleh pemerintah namun melibatkan seluruh elemen bangsa.

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi yang berkaitan yaitu aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan ditandai oleh keterisolasian, keterbelakangan dan pengangguran yang kemudian meningkat menjadi kepentingan antara daerah-daerah yang belum sepenuhnya tertangani. Ada sebagian sektor yng harus menampung tenaga kerja secara berlebihan dengan tingkat produktifitas yang rendah, dan adapula sebagian masyarakat yang belum ikut serta dalam pembangunan sehingga belum dapat menikmati hasilnya secara memadai.

Kemiskinan umumnya diukur dengan tingkat pendapatan dan pada dasarnya dibebankan dalam tiga pengertian; kemiskinan natural atau alamiah, kemiskinan sruktural, dan kemiskinan natural. Selanjutnya menurut Sumodiningrat (1997) dijelaskan ketiga pengertian kemiskinan tersebut sebagai berikut, seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Penggolongan dengan garis kemiskinan tersebut sesuai dengan kebutuhan minuman, antara lain

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

diukur dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk dapat hidup wajar dan menyekolahkan anak.

Kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan sudah di atas garis kemiskinan, namun sebenarnya termasuk miskin, tetapi masih lebih miskin dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari asalnya memang miskin, kelompok masyarakat ini miskin karena tidak memiliki sumberdaya yang memadai baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia, maupun sumberdaya lainnya. Mereka tidak dapat ikut serta dalam pembangunan atau kalaupun ikut serta dalam pembangunan mereka hanya mendapatkan imbalan pendapatan yang rendah. Kemiskinan natural ada disetiap negara yang sedang berkembang. Pembangunan yang direncanakan melalui berbagai macam program kebijakan ditujukan untuk mengurangi kemiskinan natural ini.

Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan di Indonesia sebesar US $ 75 per kapita per tahun untuk daerah pedesaan, dan US $ 125 per kapita per tahun untuk daerah perkotaan. Perbedaan garis batas antara kota dan desa ini berkaitan erat dengan perbedaan tingkat biaya hidup diantara keadaan wilayah tersebut. Sedangkan Sayogyo (1983) mengusulkan cara mengukur kemiskinan dengan pendekatan kemiskinan absolut. Cara ini dilakukan dengan mempertimbangkan standar kebutuhan pokok berdasarkan kebutuhan beras dan gizi lainnya. Pandangannya yaitu ada tiga golongan orang miskin (1) golongan paling miskin yang mempunyai pendapatan perkapita pertahun

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

bernilai beras sebanyak 240 kg atau kurang, (2) golongan miskin yang memiliki pendapatan perkapita pertahun beras sebanyak 240 kg hingga 360 kg, dan (3) cukup miskin yang memiliki pendapatan besar perkapita pertahun lebih dari 360 kg tetapi kurang dari 480 kg.

Ditinjau dari segi pendapatan petani kecil identik dengan petani miskin. Menurut Nugroho (1999), terdapat 2 kategori tingkat kemiskinan yaitu (1) kemiskinan absolut dan (2) kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dinyatakan dalam bentuk berapa persen pendapatan nasional yang diterima oleh sekelompok penduduk tertentu sehingga dengan dasar ini Bank Dunia (Tangkesalu, 1997) menentukan kriteria kemiskinan sebagai berikut :

1. Jika 40% penduduk dengan pendapatan terendah menerima kurang dari 12% pendapatan nasional maka digolongkan dalam ketimpangan menyolok.
2. Jika 40% penduduk dengan pendapatan terendah menerima antara 12-17% pendapatan nasional, maka dapat digolongkan dalam ketimpangan sedang
3. Jika 40% penduduk dengan pendapatan terendah menerima lebih dari 17% pendapatan nasional, maka dapat digolongkan dalam ketimpangan lemah.

Selain kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif tersebut, Sumodiningrat (1997) mengemukakan tentang kemiskinan kultural yaitu mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tertentu dan tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupannya, meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya

Dikaji dari pola waktu Kartasasmita (1996) mengemukakan bahwa kemiskinan disuatu daerah dapat digolongkan ke dalam 4 pola, yaitu:

1. Pola Pertama adalah *persistent poverty,* yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Daerah seperti ini pada umumnya merupakan daerah-daerah yang kritis sumberdaya alamnya atau daerah yang terisolasi.
2. Pola kedua adalah *cyclicar poverty,* yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan.
3. Pola ketiga adalah *seasional poverty* yaitu kemiskinan musiman seperti sering di jumpai pada kasus nelayan dan pertanian tanam pangan.
4. Pola ke empat adalah *accidental poverti* yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan menurunya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Dari uraian tersebut tampak terdapat banyak cara pengukuran kemiskinan dengan standar yang berbeda-beda. Indikator kemiskinan yang paling sering digunakan adalah pendekatan terhadap pemenuhan konsumsi sembilan bahan pokok perkapita. Pendapatan atau pengeluaran perkapita, konsumsi beras perkapita serta tingkat gizi perkapita. Bank Dunia menetapkan bahwa batas garis kemiskinan adalah US $ 50 dan US $ 75 per tahun, masing-masing untuk daerah pedesaan dan perkotaan Sayogyo (1983) melakukan penelitian kemiskinan berdasarkan tingkat pendapatan perkapita pertahun ke dalam kilogram beras sebagai berikut :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1. Miskin sekarat atau melarat, apabila pendapatan perkapita pertahun < 180 kg beras untuk di desa dan < 240 kg beras untuk daerah perkotaan
2. Miskin sekali apabila pendapatan perkapita pertahun sebesar 180-240 kg beras untuk daerah pedesaan dan 240 – 360 kg untuk daerah perkotaan.
3. Miskin, apabila pendapatan perkapita pertahun sebesar 240 – 360 kg beras untuk daerah pedesaan dan 360 – 480 kg beras untuk daerah perkotaan.
4. tidak miskin, apabila perkapita pertahun > 320 kg beras untuk daerah pedesaan dan 480 kg beras untuk daerah perkotaan.

Menurut Susena (1990) dalam Cornelis (2005), mengatakan penduduk miskin di Indonesia berjumlah 48,0 juta jiwa. Pada tahun 2000 menurun menjadi 38,7 juta jiwa (Susenas, 2001). Dalam Susenas 2001, penduduk miskin menurun menjadi 37,9 juta pada tahun 2001 dan pada tahun 2002 meningkat menjadi 38,4 juta jiwa.

Kemiskinan dapat bermakna kesenjangan ekonomi dan ketidak merataan pendapatan, kedua hal ini merupakan masalah yang hangat dibicarakan karena masih besarnya penganggaran terselubung yang disebabkan masih adanya pekerjaan yang dilakukan di bawah produktivitas kerja (*under employmen)* dengan tingkat kemiskinan.

Dinamisasi kelompok masyarakat nelayan bertujuan untuk mengembangkan kelompok masyarakat nelayan untuk bekerja sama menurut pola modern. Pengembangan pola interaksi berfungsi antara anggota kelompok masyarakat untuk mencapai hasil usaha yang efisien dan efektif, merupakan tujuan utama. Penciptaan iklim kerjasama antara sesama nelayan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

yang diperkuat oleh adanya tanggung jawab bersama terhadap kelangsungan usaha yang dilakukan dan pemelihraan kelestarian lingkungan wilyah pantai tempat mereka berusaha, merupakan model pembangunan masyarakaat pantai yang sanggup melahirkan partisipasi aktif masyarakat pendukung.

Dalam hubungan ini beberapa langkah penting akan dilaksanakan sebagai berikut :

- Pelaksanaan dan perumusan kerjasama kelompok masyarakat nelayan dengan instansi pemerintah daerah dan kelompok swadaya masyarakat terkait' pembentukan tim penyuluh koordinator pelaksana, dan tim pakar/narasumber
- Pengelompokan masyarakat nelayan berdasarkan wilayah pemukiman, dan perumusan hak dan kewajiban anggota kelompok'
- Pembentukan organisasi kelompok masyarakat nelayan (embrio koperasi nelayan /unit usaha/kelompok kontak
- Pelatihan/percontohan pengembangaan budaya yang mencakup proses produksi (*processing*) paska panen penyimpanan dan pemasaran. (Taslim, 2006).

8. Efektifitas Program PEMP

Efektifitas menunjukkan kemampuan organisasi untuk mencapai hasil seperti yang direncanakan baik kuantitas maupun kualitas. Dalam pengertian manajemen yang sehat sudah tersimpul pengertian efisiensi dan efektifitas dalam arti bahwa segala sesuatu dikerjakan dengan berdaya guna. Dalam arti

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

segala sesuatu dikerjakan dengan cepat, tepat hemat dan selamat. Tetap dalam arti kena sasarannya, apa yang dikehendaki tercapai atau apa yang dicita-citakan menjadi kenyataan. Tepat berarti tidak menghabiskan waktu, tidak perlu selesai tepat pada waktu atau sebelum waktu yang ditetapkan. Hemat dalam arti biaya sekecil-kecilnya tanpa terjadi pemborosan dalam bidang apapun. Selamat berarti segala sesuatu sampai pada tujuan yang dimaksud tanpa mengalami hambatan, kelambatan ataupun kemacetan (Soekarno, 1994).

Lubis & Huseini (1987) mengemukakan tiga pendekatan pengukuran efektifitas yaitu (1) pendekatan sumber (*system resourse)* mengukur efektifitas dari sisi input yaitu mengukur keberhasilan organisasi dalam mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang baik, (2) pendekatan proses (*process approach)* melihat kegiatan internal organisasi dan mengukur efektifitas melalui berbagai indikator internal dan (3) pendekatan saaran (*goal approach)* dalam pengukuran efektifitas memutuskan perhatian pada aspek output, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai output yang direncanakan.

Ketiga pendekatan tersebut, masing-masing mempunyai kelemahan karena itu salah satu cara yang sering digunakan dalam mengukur efektifitas adalah dengan menggunakan ketiga pendekatan tersebut secara bersamaan yang dikenal dengan pendekatan terpadu atau integral (*integrative aproach*). Karena kelemahan tersebut, maka pengukuran efektifiitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan integrative dengan asumsi bahwa (1) organisasi melakukan berbagai macam kegiatan, (2) mempunyai berbagai output yang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dihasilkan, dan (3 kegiatan berorientasi internal dan eksternal organisasi (Lubis & Huseini 1987).

B. Kerangka Berpikir

Kabupaten Halmahera Selatan memiliki potensi perikanan yang menjanjikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Produksi perikanan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik perikanan tangkap maupun budidaya perairan. Namun hal ini kontradiksi dengan pendapatan nelayan yang minim serta program bantuan terhadap nelayan yang tidak tepat sasaran, sehingga masyarakat pesisir di Desa Bajo Kabupaten Halmahera selatan masih banyak yang tergolong sebagai nelayan miskin. Penanggung jawab program pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir adalah Departemen Kelautan dan Perikanan dalam hal ini berfungsi sebagai fasilitator kegiatan pembangunan khususnya kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin agar dapat terangkat derajat hidupnya ke arah yang lebih baik. Mayoritas masyarakat desa setempat tergolong miskin.

Berdasarkan program tersebut akan dianalisis hingga sejauh mana pelaksanaan program PEMP telah berjalan dengan baik atau belum. Disamping itu juga akan diminimalisir hal-hal yang dapat menghambat atau faktor yang dapat berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap keberadaan program ini yang kini telah berjalan.

Hasil penelitian diharapkan dapat menganalisis Peranan PEMP dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir di Desa Bajo Kabupaten

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Halmahera Selatan dan menganalisis efektifitas pelaksanaan PEMP dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir serta merumuskan Strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan dalam pengelolaan wilayah pesisir di Desa Bajo Kabupaten Halmahera Selatan. Kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

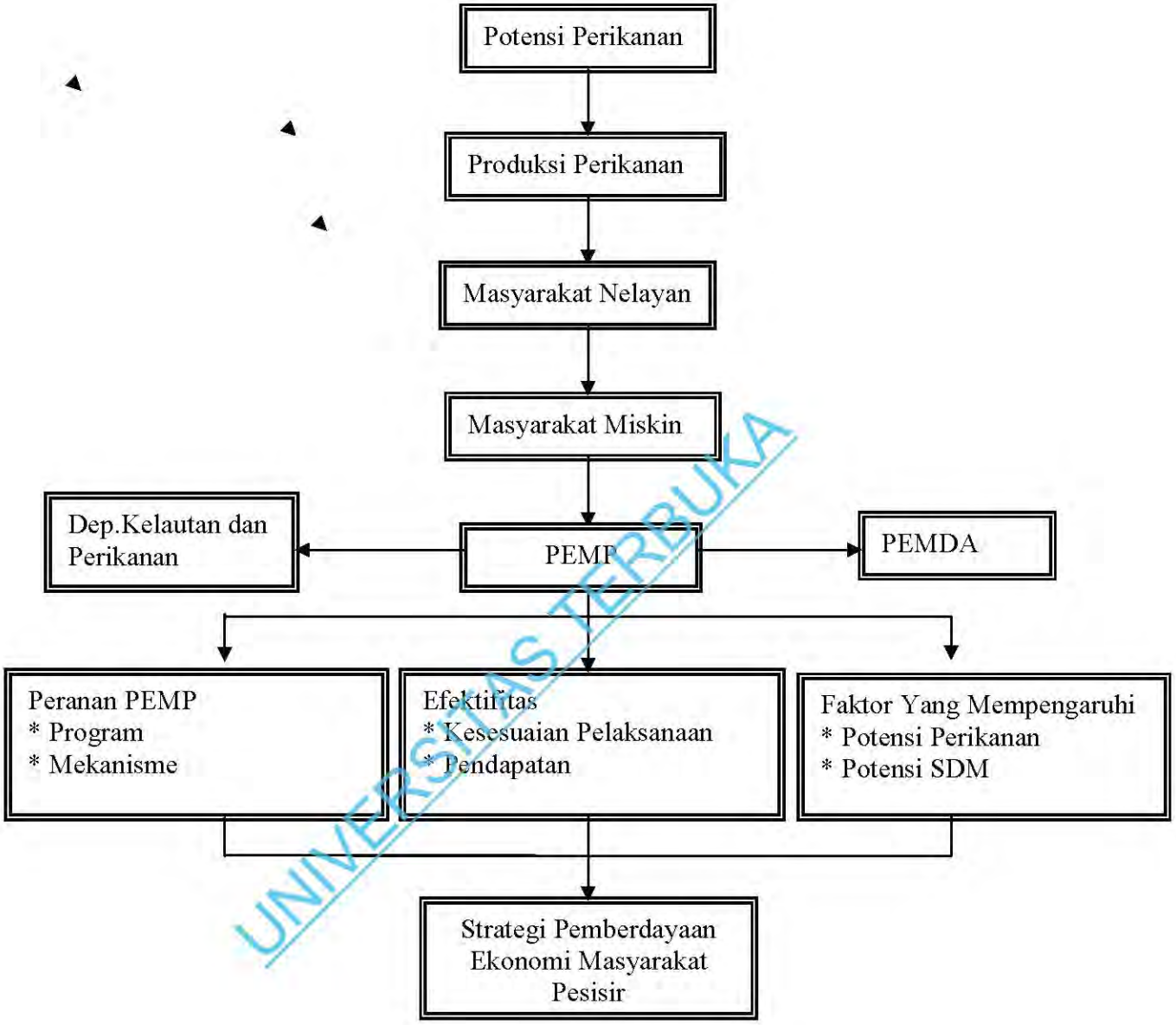

UNIVERSITAS TERBUKA

Gambar 2.1. Kerangka Pikir

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

D. Definisi Konsep dan Operasional

1. Masyarakat nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan usaha perikanan tangkap.
2. Potensi perikanan adalah seluruh sumberdaya perikanan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir.
3. Program PEMP adalah program peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan pendapatan serta mendorong masyarakat pesisir khususnya nelayan untuk mengembangkan kemitraan.
4. Kemiskinan adalah pendapatan dibawah dari 320 kg setara dengan beras perkapita pertahun.
5. Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan oleh koperasi Swamitra untuk keperluan kelancaran usaha yang dibutuhkan secara terus menerus untu;k keperluan bahan baku, upah kerja dan lain-lain.
6. Kredit PEMP merupakan kredit yang diberikan oleh Koperasi Swamitra Mina untuk nelayan kecil yang didasarkan atas rencana usaha bersama.
7. Kelompok nelayan kecil adalah kumpulan beberapa petani nelayan kecil yang terhimpun dalam satu kelompok antara 6 – 16 orang.
8. Nelayan kecil adalah masyarakat pedesaan yang berpendapatan rendah atau kurang dari 320 kg setara beras perkapita pertahun.
9. Pendapatan keluarga adalah selisih pendapatan yang diperoleh keluaga sebelum dan setelah mendapatkan bantuan pembinaan dan modal PEMP.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

10. Lama usaha adalah waktu yang dihitung sejak pertama kali melaksanakan usaha ekonomi produktif yang dinyatakan dalam setahun.
11. Peranan PEMP adalah dalam rangka peningkatan pendapatan keluarga penerima diukur dengan melakukan perbandingan pendapatan keluarga sebelum dan setelah menerima PEMP.
12. Keluarga petani adalah keluarga yang kepala keluarganya, baik yang mempunyai tanah sendiri menyewa atau menggarap dengan mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah tersebut untuk pertanian.
13. Efektifitas pelaksanaan PEMP adalah keberhasilan keluarga penerima dalam melaksanakan usaha atau kegiatan yang diukur dari peningkatan taraf hidupnya, dimana kategori yang digunakan adalah dinilai dari tingkat produktivitas program PEMP. Tingkat produktivitas adalah (1) kesesuaian antara program dengan pelaksanaan (2) dampak program PEMP terhadap peningkatan pendapatan masyarakat penerima PEMP.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di desa Bajo Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara. Waktu penelitian dilakukan selama 2 bulan yaitu bulan April sampai dengan bulan Mei 2009.

Lokasi Penelitian Sumber: Peta Republik Indonesia

Gambar 3.1. Lokasi Penelitian

B. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga yang telah menerima dana dari PEMP sebanyak 50 KK. Penentuan responden dilakukan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

secara sensus sehingga jumlah responden dalam penelitian ini adalah 50 orang KK. Sebagai data pembanding dilakukan wawancara kepada beberapa informan yaitu kepala keluarga yang tidak menerima dana PEMP.

C. Instrumen Penelitian

1. Kuesioner, digunakan sebagai acuan dalam melakukan wawancara dengan nelayan.
2. Alat tulis, digunakan untuk mencatat hasil wawancara dengan nelayan.
3. Kamera, digunakan untuk dokumentasi.
4. Komputer, yang digunakan yaitu *Microsof Windows XP Intel Pentium* III, *Processor* 450 MHZ 128 MB *of* RAM. Alat ini digunakan untuk menganalisis data dan membuat laporan akhir penelitian.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan melalui sejumlah pertemuan informan yang prosesnya berlangsung tanya jawab dan pembicaraan akrab mengenai berbagai aspek penelitian (Lampiran 3).
2. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang tampak pada objek-objek penelitian di lapangan seperti penggunaan sarana prasarana, keadaan pemukiman, dsbnya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3. Dokumentasi, yaitu dengan melakukan pencatatan, pengambilan gambar di lapangan melalui pemotretan, serta fotocopy data sekunder dari instansi terkait.
4. Daftar kuesioner.

E. Metode Analisis

1. Untuk mengetahui peranan PEMP dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir dilakukan analisis deskriptif. Secara teknis model analisis yang digunakan adalah memilah dan menghubungkan setiap konteks permasalahan menurut konteks pemaknaannya dalam rangka mengungkap substansi masalah yang diteliti (Moleong, 1998).
2. Untuk mengetahui tingkat efektifitas pelaksanaan program PEMP pada keluarga penerima dana PEMP berdasarkan tingkat produktivitas program PEMP. Tingkat produktivitas adalah (1) kesesuaian antara program dengan pelaksanaan (2) dampak program PEMP terhadap peningkatan pendapatan masyarakat penerima PEMP.

   Dalam menjawab pertanyaan penelitian berhubungan dengan efektifitas program PEMP ini juga menggunakan tabel distribusi frekuensi dan presentase dengan menggunakan rumus sebagai berikut : (Sudjana, 2002).

$$P = \frac{F}{N} \times 100\ \%$$

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

P = Presentase

F = Frekuensi pada kualifikasi atau kategori jawaban responden

N = Jumlah frekuensi jawaban responden

3. Sedangkan untuk menganalisis strategi pemberdayaan ekomomi masyarakat nelayan dalam pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan di Desa Bajo menggunakan Analisis SWOT sebagai berikut:

Analisis SWOT

Pembobotan dan skoring dalam analisis SWOT ini dilakukan berdasarkan hasil wawancara, yang kemudian dijustifikasi oleh peneliti dalam bentuk bobot dan skor. Berdasarkan Rangkuti (2004) langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis SWOT ini adalah sebagai berikut:

Tahap Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data merupakan suatu kegiatan pengklasifikasian dan pra-analisis. Pada tahap ini data dibedakan menjadi dua, yaitu data eksternal dan internal. Data eksternal berasal dari lingkungan luar (peluang dan ancaman) seperti peningkatan PAD, peningkatan produksi, penurunan kualitas lingkungan pesisir, konflik pemanfaatan ruang penangkapan dan sebagainya, sedangkan data internal berasal dari dalam sistem pengelolaan ekosistem di Desa Bajo, mencakup ketersediaan sumberdaya alam, kondisi sumberdaya manusia dan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pengembangan kawasan yang sedang dijalankan (kekuatan dan kelemahan). Dalam tahap ini digunakan dua model matriks yaitu: (i) matriks faktor strategi eksternal, dan (ii) matriks faktor strategi internal. Adapun matriks faktor strategi internal disusun dengan langkah-langkah pada tiap kolom sebagai berikut:

- Pada kolom 1 disusun kekuatan-kekuatan (*strength*) dan kelemahan-kelemahan(*weaknesses*).
- Pada kolom 2 diberi bobot terhadap masing-masing faktor, mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Jumlah bobot untuk semua faktor kekuatan dan kelemahan sama dengan 1,0.
- Pada kolom 3 diberi skala rating mulai dari nilai 4 (*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*), berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi pemanfaatan lahan untuk suatu kegiatan tertentu. Pemberian nilai rating untuk kekuatan bersifat positif (nilai 4 = sangat besar, 3 = besar, 2 = sedang, dan 1 = kecil). Sedangkan pemberian nilai rating untuk kelemahan bersifat negatif (nilai 4 = kecil, 3 = sedang, 2 = besar, dan 1 = sangat besar).
- Pada kolom 4 diisi nilai hasil perkalian bobot dan rating suatu faktor yang sama. Nilai hasil kali tersebut merupakan skor pembobotan dari faktor tersebut.
- Pada kolom 5 diberi komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotannya dihitung.
- Menjumlahkan skor pembobotan pada kolom 4.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 3.1. Analisis strategi faktor internal *(Internal Strategic Factors Analysis Summary)*

Faktor-faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Skor	Komentar
1	2	3	4	5
Kekuatan (*Strength*):				
S1		4		
S2		3		
S3		2		
....		1		
Kelemahan (*Weakness*):				
W1		1		
W2		2		
W3		3		
....		4		
TOTAL	1,00	-		

UNIVERSITAS TERBUKA

Matriks faktor strategi eksternal disusun dengan langkah-langkah:

- Pada kolom 1 disusun peluang-peluang dan ancaman-ancaman.
- Selanjutnya pada kolom 2 diberi bobot terhadap masing-masing faktor peluang dan ancaman, mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Jumlah bobot untuk semua faktor peluang dan ancaman sama dengan 1,0.
- Pada kolom 3 diberi skala rating mulai dari nilai 4 (*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*), berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi pemanfaatan lahan untuk suatu kegiatan tertentu. Pemberian nilai rating untuk peluang bersifat positif (nilai 4 = sangat besar, 3 = besar, 2 = sedang, dan 1 = kecil). Sedangkan pemberian nilai rating untuk

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

ancaman bersifat negatif (nilai 4 = kecil, 3 = sedang, 2 = besar, dan 1 = sangat besar).

- Pada kolom 4 diisi nilai hasil perkalian bobot dan rating suatu faktor yang sama. Nilai hasil kali tersebut merupakan skor pembobotan dari faktor.
- Pada kolom 5 diberi komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotannya dihitung.
- Menjumlahkan skor pembobotan pada kolom 4. Nilai tersebut menunjukkan bagaimana sistem bereaksi terhadap faktor-faktor strategis eksternalnya.

Tabel 3.2. Analisis strategi faktor eksternal *(Eksternal Strategic Factors Analysis Summary)*

Faktor-faktor Strategi Eksternal	Bobot	Rating	Skor	Komentar
1	2	3	4	5
Peluang (*Opportunity)*:				
O1		4		
O2		3		
O3		2		
....		1		
Ancaman (*Threath)* :				
T1		1		
T2		2		
T3		3		
....		4		
TOTAL	1,00	-		

Tahap Analisis

Pada tahap analisis digunakan Model Matriks SWOT, dimana terdapat 4 strategi yang dapat dihasilkan, yaitu strategi SO, WO, ST, dan WT (Tabel 3.3). Setelah diperoleh matriks SWOT, selanjutnya disusun rangking semua strategi yang dihasilkan berdasarkan faktor-faktor penyusun strategi tersebut.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 3.3. Model Matriks SWOT Hasil Analisis SWOT

EFAS	IFAS	
	STRENGTH (S)	WEAKNESSES (W)
OPPORTUNITIES (O)	SO2	WO2
	SO3	WO3
	..	..
	..	..
	SOn	WOn
THREATS (T)	ST1	WT1
	ST2	WT2
	ST3	WT3
	..	..
	..	..
	STn	WTn

Keterangan :

S = *Strength* (kekuatan)

W = *Weakness* (kelemahan)

O = *Opportunity* (peluang)

T = *Threath* (ancaman)

EFAS = *Eksternal Factor Analysis Strategic*

IFAS = *Internal Factor Analysis Strategic*

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

A.1. Keadaan Fisik Wilayah

Desa Bajo adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera selatan, Propinsi Maluku Utara. Desa ini merupakan salah satu desa yang terdapat di Pulau Botang Lomang (Bajo, Tanjung Obit, Prapakanda, Soanakar dan Toing). Untuk mencapai desa ini, dari kota Ternate harus mengendarai kapal motor selama 8 jam lalu naik mobil selama 1 jam sampai di Kabupaten Halmahera Selatan dan setelah itu menyeberang ke pulau Botang Lomang selama ½ jam. Letak Desa Bajo yaitu pada pantai selatan agak ke barat ibukota kecamatan Bacan, sekitar 7 km sebelah barat Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Laut Halmahera
- Sebelah Timur dengan Desa Tanjung Obit
- Sebelah Selatan dengan Desa Prapakanda
- Sebelah Barat dengan Desa Sawangakar

Desa Bajo beriklim tipe B menurut klassifikasi Schmidt (BMG Propinsi Maluku Utara, 2008). Curah hujan rata-rata 1.000 – 2000 mm pertahun. Curah hujan tertinggi bulan Mei dan curah hujan terendah pada bulan Agustus. Bulan kering jarang ada bahkan tidak ada (BPS Kabupaten Halmahera Selatan, 2008). Desa Bajo beriklim tropis dan iklim musim. Daerah ini merupakan daerah

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kepulauan yang dikelilingi lautan sehingga iklim di daerah ini dipengaruhi oleh kondisi lautan luas.

Suhu udara rata-rata berkisar antara 24,85 – 27,70 ^{o}C, suhu maksimum dapat mencapai 32,4 ^{o}C dan suhu minimum dapat mencapai 21,8 ^{o}C. Kelembaban udara rata-rata tinggi berkisar antara 84 – 90%. Keadaan desa Bajo yaitu terdiri dari perbukitan serta kondisi perumahan penduduk berada di atas perairan. Rumah-rumah sebagian besar rumah kayu yang tiangnya dipancangkan di laut dan hampir seluruhnya beratap seng. Rincian keadaan rumah penduduk dapat dilihat pada Tabel 4.1 :

Tabel 4.1 Keadaan Rumah Penduduk di Desa Bajo

NNo.	**Keadaan Rumah**	**Jumlah**
1	Permanen	25
2	Semi Permanen	229
3	Darurat	54
	Jumlah	361

Sumber : Kantor Desa Bajo, 2009

Penduduk asli dari desa Bajo berasal dari Pulau Buru selatan dan Pulau Sulawesi yang mengadakan pelayaran dan menetap di Pulau Batang Lomang daerah Sangkuan sehingga desa Bajo di sebut Desa Bajo Sangkuan. Penduduk desa Bajo pada tahun 2008 berjumlah 3462 jiwa. Jumlah wanita 1137 jiwa lebih sedikit dari jumlah pria 2325 jiwa (Kantor Desa Bajo, 2009).

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Sebagian besar penduduk bergantung hidup pada sektor perikanan, dengan komoditi ikan. Dari jumlah penduduk yang sangat tergantung pada sektor perikanan ini sebagian besar berprofesi sebagai nelayan.

Tabel 4.2. Mata Pencaharian Penduduk Desa Bajo

NNo	Mata Pencaharian	Jumlah Kepala keluarga	Persentase (%)
1	Nelayan	596	61,51
2	Petani	155	16
3	Pegawai	37	3,82
4	Pedagang	17	1,75
5	Buruh	55	5,67
6	Lain-lain	109	11,25
	Jumlah	969	100

Sumber : Kantor Desa Bajo, 2009

Komunitas penduduk Bajo sekarang ini sangat beragam, kebanyakan mereka berasal dari berbagai suku (Bajo, Bugis, Makassar, Mandar, Buton, Gorontalo, Makian, Tobelo, Galela, Sumatera, Tidore, ternate, dan Jawa). Sementara bahasa yang digunakan di desa ini yaitu bahasa Bajo.

Pendidikan penduduk Desa Bajo ini kebanyakan hanyalah tamatan SD. Berdasarkan pendidikan formal kualitas sumberdaya manusia di desa Bajo sangat rendah karena penduduk desa Bajo ini kebanyakan hanyalah tamatan SD, Jika penduduk tamat SD, tidak tamat SD, dan belum sekolah digabungkan, proporsinya mencapai 65,13%. Secara rinci keadaan pendidikan penduduk Desa Bajo dapat dilihat pada Tabel 4.3:

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Bajo

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Belum Sekolah	571	24,56
2	Buta Huruf	271	11,66
3	Tidak Tamat SD	408	17,55
4	Tamat SD	535	23,02
5	SLTP	277	11,92
6	SLTA	258	11,11
7	Perguruan Tinggi	3	0,12
8	Tamat Perguruan Tinggi	1	0,06
	Jumlah	2325	100

Sumber : Kantor Desa Bajo, 2009

Fasilitas pendidikan yang ada di Desa Bajo masih sangat kurang, dimana keberadaan lembaga pendidikan seperti Perguruan Tinggi belum ada sehingga apabila penduduk desa ini ingin melanjutkan pendidikan di jenjang Pendidikan Tinggi harus ke Kabupaten yang mempunyai lembaga pendidikan tersebut. Selain itu hanya sebagian kecil penduduk dapat yang dapat menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang Perguruan Tinggi mengingat biaya yang dikeluarkan akan lebih besar. Jenis dan jumlah fasilitas pusat pelayanan umum dapat dilihat pada Tabel 4.4.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.4. Jenis dan Jumlah Fasilitas Pusat Pelayanan

No	Jenis	Jumlah
1	Kantor Desa	1
2	Pasar	1
3	Balai Pertemuan Masy.	1
4	Puskesmas Pembantu	1
5	Sekolah	
	- TK	1
	- SD	2
	- SMP	1
	- SMA	1
	- Perguruan Tinggi	0
6	Masjid	2
7	Warung, kios	2
8	TPI	1
9	KUD	3

Sumber : Kantor Desa Bajo, 2009

Unit penangkapan ikan pada dasarnya terdiri dari alat transpor dan alat tangkap. Alat transpor yang ada pada unit penangkapan ikan di Desa Bajo adalah perahu motor, sampan, perahu layar (perahu tanpa motor), dan kapal kayu yang digunakan untuk menangkap ikan dengan jangkauan yang lebih jauh dari lokasi pendaratan.

Sebagian dari nelayan Desa Bajo ini nampaknya cocok dengan cara penangkapan ikan yang lebih bersifat berburu apabila musim paceklik (atau musim kurang ikan) di daerahnya, para nelayan akan mencari ikan menuju ke daerah lain seperti ke Kabupaten Halmahera Utara tepatnya di daerah Morotai. Oleh karena itu mereka sangat membutuhkan alat transpor yang lebih cocok

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

untuk perjalanan jauh. Karena itu jugalah sehingga kapal kayu yang jangkauan operasinya cukup jauh dari tahun ke tahun semakin bertambah. Secara lebih rinci dapat kita lihat perkembangan jumlah armada penangkapan ikan di Desa Bajo pada Tabel 4.5

Tabel 4.5 Perkembangan Jumlah Armada Penangkapan Ikan di Desa Bajo

No	Jenis Armada Penangkapan	2006	2007	2008
1	Perahu tanpa Motor	62	71	87
2	Perahu motor tempel	27	32	39
3	Kapal Motor	25	32	43

Sumber : Kantor Desa Bajo dan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Selatan, 2009

Kapal motor yang berada di Desa Bajo yaitu armada penangkapan Tuna yaitu Pole and Line, sementara perahu-perahu tanpa motor ini umumnya pemilikannya secara pribadi atau nelayan mandiri yang menggunakan alat tangkap pancing atau pukat. Keberadaan desa Bajo yang merupakan pulau kecil yang menyebabkan akses ke pasar dan ke Kecamatan susah karena harus melalui transportasi laut yang membutuhkan waktu yang lama di tambah dengan kenaikan harga BBM yang menyebabkan semakin tingginya biaya transportasi.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

A.2 Masyarakat Nelayan Desa Bajo

Dalam sejarah perkembangan nelayan khususnya di desa Bajo Kabupaten Halmahera Selatan menunjukkan bahwa dalam perkembangannya para nelayan menggunakan alat-alat penangkapan dari yang sederhana hingga yang bersifat teknologi modern. Usaha penangkapan ikan atau matapencaharian sebagai nelayan yang dilakukan selama ini secara turun temurun sampai saat ini masih bertahan dengan pola-pola atau cara-cara tradisional. Walaupun pada awalnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarganya (*subsistence fishing*), namun pada perkembangan selanjutnya mengarah pada bentuk perikanan komersial yang diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan yang semakin meningkat dan bervariasi. Masyarakat nelayan di tiga lokasi penelitian mengenal serta mengembangkan berbagai jenis usaha penangkapan ikan di laut sejak lama. Pada umumnya jenis-jenis usaha tersebut dilakukan secara tradisional sesuai pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, dengan peralatan yang cukup sederhana.

Pengetahuan dan ketrampilan penangkapan ikan tersebut diwarisi dari generasi terdahulu, selanjutnya ditransformasikan kepada generasi muda melalui proses sosialisasi dalam waktu yang relatif lama. Unsur-unsur pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang penangkapan ikan yang telah diwarisi secara turun temurun itu masih tetap dipertahankan sampai sekarang. Namun demikian sebagian nelayan mulai menerapkan sistem penangkapan ikan dengan teknologi modern, terutama motorisasi dalam penangkapan ikan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dalam menjalankan kegiatan penangkapan ikan sebagai mata pencaharian pokok, masyarakat

nelayan di Desa Bajo sebagian besar terhimpun dalam wadah organisasi nelayan yang disebut " Kelompok Nelayan". Disamping itu ada juga yang menjalankan aktifitas usahanya sebagai nelayan individual tanpa terikat dengan organisasi yang ada. Hal ini dapat dipahami bahwa masyarakat nelayan di lokasi ini khususnya yang bermatapencaharian sebagai nelayan tidak harus terikat pada organisasi atau wadah tertentu.

Dalam menjalankan aktifitasnya para nelayan di desa penelitian menggunakan sarana transportasi penangkapan ikan berupa perahu sampan tanpa mesin sampai perahu dengan menggunakan mesin. Dengan penggunaan alat tangkap dan sarana penangkapan yang bervariasi sehingga pendapatan dan penghasilan para nelayan juga bervariasi.

Masyarakat nelayan desa Bajo yang tidak tergabung dalam kelompok untuk melakukan aktifitas penangkapan ikan secara individual menurut cara dan kebiasaan, yang mereka anggap efektif sesuai dengan sarana dan peralatan yang mereka miliki. Hasil dari penangkapan ikan di laut cukup untuk konsumsi sendiri dan kalaupun ada sisa untuk dijual, hanya terbatas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini menurut pandangan mereka, jika mereka tergabung dalam kelompok, mereka jadi terikat kepada Pemilik kapal. Sementara itu jika mereka bandingkan dengan mereka menangkap sendiri, hasilnya tidak terlalu jauh berbeda. Memang diakui pada musim-musim tertentu, kelompok nelayan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi yaitu ketika musim ikan, tetapi itu sama

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tergantung dari keadaan alam, yang tidak dapat diduga secara pasti, dan ini merupakan resiko yang paling besar yang harus ditanggung oleh nelayan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya nelayan di lokasi penelitian melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan jarak 1 – 2 mil dari pantai. Kegiatan penangkapan ikan dapat dilakukan pada siang atau malam hari, tergantung dari jenis ikan dan jenis alat tangkap yang dioperasikan. Penangkapan ikan dengan menggunakan jala dioperasikan pada malam hari, sementara penggunaan alat tangkap jaring dan pukat dioperasikan pada siang hari.

Karakteristik nelayan desa Bajo baik yang tergabung dalam kelompok nelayan maupun nelayan mandiri, dalam melakukan aktifitas sebagai nelayan berdasarkan pengetahuan dan ketrampilan yang mereka miliki. Kategori nelayan mandiri dalam penelitian ini yaitu nelayan yang menjalankan aktifitasnya tidak terikat dengan organisasi *kelompok*. Dalam hal ini mereka bekerja sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang mereka miliki. Meskipun nelayan-nelayan mandiri ini mempunyai alat tangkap yang tradisional dan terbatas namun pada umumnya mereka cukup trampil dalam mengoperasikan alat tangkap tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan-nelayan mandiri, rata-rata penghasilan mereka dalam satu kali melaut yaitu sekita 50.000 – 100.000 rupiah, tapi terkadang jika bukan musim ikan, penghasilan mereka hanya cukup untuk kebutuhan lauk keluarga saja.

Modal usaha yang digunakan nelayan mandiri relatif kecil, selain itu mereka tidak mempunyai akses yang besar untuk mendapatkan modal usaha baik dari pihak pemerintah maupun swasta, sehingga selama ini usaha yang mereka

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

geluti tidak ada perkembangan yang signifikan. Dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh nelayan mandiri sehingga area penangkapan ikan yang dapat dijangkau juga tidak terlalu jauh. Jenis sarana dan alat tangkap yang digunakan oleh mereka ini secara langsung juga berpengaruh terhadap pendapatan. Dari hasil penelitian menunjukkan pendapatan nelayan mandiri masih relatif lebih rendah dari nelayan yang tergabung dari kelompok yang dikordinir oleh pemilik kapal. Namun seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pilihan untuk menjadi nelayan mandiri merupakan pilihan terbaik karena tidak ingin terikat dengan pemilik kapal.

Secara rinci, uraian tentang masing-masing alat tangkap yang umum dipergunakan oleh nelayan-nelayan (mandiri maupun kelompok) di Propinsi Maluku Utara khususnya di tiga lokasi penelitian yaitu dengan pancing, pukat dan bagan.

1. Pancing

Teknologi pancing dalam sistem penangkapan oleh nelayan di Maluku Utara adalah salah satu jenis alat tangkap yang sudah lama dikenal. Secara klasifikatoris Jenis-jenis pancing yang dikenal ada tiga jenis antara lain pancing ikan cakalang (*Pole and line*), pancing tonda (*long line*) dan pancing ikan dasar

a. Pole and Line

Dalam penelitian ini ditemukan pada desa Bajo bahwa untuk mengoperasikan alat tangkap *pole and line* dibutuhkan beberapa tenaga kerja oleh karena itu kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tangkap *Pole and line* dilakukan secara berkelompok. Kelompok tersebut memiliki anggota 11 - 14 orang terdiri dari pemilik kapal dan anak buah kapal yang terdiri dari 1 anak buah kapal sebagai juragan (juru keker atau pengarah kapal), 1 anak buah kapal sebagai juru mesin, 1 orang anak buah kapal sebagai pelempar umpan yang diistilahkan *boy-boy* di daerah setempat dan anak buah kapal lainnya sebagai bagian memancing. Kelompok nelayan tersebut mempunyai fungsi dan peranan dalam operasi penangkapan sebagai berikut :

- Pemilik kapal, sebagai pemilik modal dan alat tangkap serta bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kelompok.
- Anak buah kapal Juragan, bertindak sebagai pemimpin operasi penangkapan dan bertanggung jawab atas keselamatan kapal, alat-alat tangkap dan anak buah kapal yang lain selama operasi penangkapan ikan berlangsung mulai saat pemberangkatan hingga kembali ke daratan. Sebagai pemimpin operasi penangkapan, juragan juga berfungsi sebagai juru keker dan pengemudi kapal.
- Anak buah kapal juru mesin bertugas menangani bagian mesin sehingga kapal dapat dioperasikan dengan baik.
- Anak buah kapal *boy-boy* bertugas sebagai pelempar umpan untuk memancing ikan dan setelah itu juga sebagai pemancing ikan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

- Anak buah kapal yang lain bertugas sebagai pemancing ikan dan bertugas membantu juragan dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan operasi penangkapan ikan.

b. Pancing Tonda

Jenis pancing ini diberi nama sesuai dengan bentuknya yang saling berantai. Dilihat dari bentuknya pancing ini memiliki mata pancing yang sangat banyak (mencapai 200 sampai 300) dimana satu mata pancing dengan mata pancing lainya saling mengikat atau saling bergandengan dengan jarak kurang lebih 20 cm. Cara pengopersiannya tidak menggunakan umpan, melainkan hanya menggunakan benda-benda yang dapat menarik perhatian ikan seperti bulu ayam, atau tali rapia yang diikat pada setiap pangkal mata pancing. Jenis alat tangkap ini dapat dioperasikan pada malam hari atau juga memungkinkan pada siang hari, jenis ikan yang umum ditangkap adalah ikan kembung.

UNIVERSITAS TERBUKA

c. Pancing Ikan Dasar

Jenis pancing ini biasanya dioperasikan oleh nelayan pada sore hari, dimana dalam proses pengoperasiannya dimulai dengan kegiatan mencari umpan berupa ikan-ikan kecil, sedangkan daerah pengoperasiannya dilakukan pada daerah yang umumnya agak dangkal dan banyak ditumbuhi batu karang. Khusus di Propinsi Maluku Utara jenis pancing ikan dasar ini digunakan dengan menggunakan alat bantu

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

berupa perahu tanpa menggunakan motor (mesin) yang hanya biasa menampung sekitar dua orang nelayan. Ada pun jenis ikan yang tertangkap adalah ikan kerapu, kakap dan beberapa jenis ikan karang lainnya

2. Pukat

Berdasarkan jenisnya pukat atau jaring yang digunakan oleh nelayan di Maluku Utara adalah:

a. Pukat Tetap

Pukat tetap adalah jaring insang yang dipasang secara menetap dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan alat penahan berupa jangkar yang dipasang pada bagian bawah jaring. Pemasangan jenis pukat ini dilakukan dengan cara bervariasi tergantung pada jenis ikan yang akan ditangkap. Jika jenis pukat ini dipasang di dasar laut , maka jenis ikan yang akan ditangkap adalah ikan-ikan tertentu yang hidup di dasar laut. Sebaliknya jika dipasang dipermukaan atau pertengahan badan air, ini dimksudkan untuk menangkap ikan-ikan tertentu yang hidup di permukaan atau pertengahan air laut. Berdasarkan pada pengetahuan masyarakat nelayan, mereka mengetahui dengan baik jenis ikan yang hidup pada kondisi air tertentu, bahkan mereka sangat mengetahui masing-masing jenis ikan dengan habitat dimana mereka hidup. Dengan pengetahuan seperti itu mereka menentukan strategi yang digunakan dalam teknik penangkapan, termasuk di dalamnya teknik memasang jaring.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Proses pengoperasian jenis alat tangkap ini adalah dengan cara dipasang disuatu tempat yang sepengetahuan dan pengalaman nelayan diyakini banyak terdapat ikan, setelah itu pukat dipasang atau dibentangkan, kemudian nelayan membiarkannya untuk beberapa saat (biasanya selang waktu tiga sampai empat jam) dan kemudian mengangkat untuk mengambil ikan yang terjaring. pemasangan kembali dilakukan untuk rentang waktu yang sama. Cara lain yang biasa dilakukan nelayan adalah dengan memasang pukat pada sore hari dan diangkat pada pagi hari. Jenis alat tangkap ini dioperasikan disekitar pantai.

b. Jaring Insang Hanyut

Bentuk jaring ini empat persegi panjang dan dilengkapi dengan pemberat pada tali ris bawah, dan pelampung pada tali ris bagian atas. Jenis pukat ini dipasang tegak lurus di dalam air dan dimaksudkan untuk menghadang gerakan ikan yang melintas. Jaring insang hanyut adalah jaring insang yang dipasang dengan cara salah satu ujungnya diikatkan pada perahu dan ujung lainnya dibiarkan lepas terhanyut dibawah arus air.

Proses pengoperasian jenis alat tangkap ini sebenarnya sama dengan jenis pukat tetap, prinsip yang membedakan adalah karena salah satu bagian ujungnya bebas bergerak sesuai dengan pergerakan arus air.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3. Bagan

Bagan merupakan sistem penangkapan yang sifatnya menggunakan alat bantu pencahayaan (lampu) yang berfungsi untuk menarik perhatian kawanan ikan, sehingga berkumpul pada suatu tempat untuk ditangkap. Adapun jenis bagan yang digunakan adalah bagan perahu (rakit), bagan jenis ini memiliki kelebihan dibanding dengan bagan tancap karena dapat dipindahkan sesuai dengan musim. Pada saat musim barat tiba maka jenis bagan perahu ini dapat diistirahatkan atau dibawa berlindung dibalik pulau sampai datangnya musim timur berikutnya. Bagan jenis ini menggunakan bahan bambu berjumlah kurang lebih 100 batang yang ditopang oleh tumpukan bambu sebagai rakit. Namun berbeda dengan bagan tancap yang menggunakan waring/jaring yang dipasang secara permanen disuatu tempat. Bagan jenis ini dapat bergerak dengan ditarik perahu dayung. Prinsip kerjanya bila ikan sudah berkumpul banyak dibawah bagan, jaring diturunkan. Ukuran bagan rakit 7 x 7 meter dan dioperasikan oleh tiga orang dengan pembagian kerja yang baik yakni dua orang bertugas mengangkat dan menurunkan jaring dan satu orang bertugas pada lampu.

B. Peranan PEMP dalam Peningkatkan Pendapatan Masyarakat Pesisir

B.1. Program PEMP

Khusus mengenai pekerjaan sebagai nelayan, pada umumnya nelayan di Desa Bajo bekerja berdasarkan penguasaan sistem penangkapan ikan yang dikuasainya. Pada umumnya nelayan hanya menggunakan alat tangkap yang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

masih sederhana berupa pancing, jala, bubu, dan tombak. Kemampuan untuk pengembangan teknologi masih sangat terbatas dan juga untuk mengadopsi teknologi yang datang dari luar juga sangat terbatas disebabkan tidak adanya mobilitas sosial penduduk yang mengarah ke perbaikan tingkat teknologi yang mereka gunakan. Oleh karenanya perkembangan tingkat ekonomi dan kehidupan sosial mereka berjalan sangat lambat, hampir tidak ada perhatian dan upaya yang sistimatis untuk memperbaiki mutu kehidupan nelayan melalui usaha pendidikan, akibatnya sampai kurung waktu 1970-an kehidupan nelayan di desa Bajo Propinsi Maluku Utara masih sangat tertinggal di bandingkan hidup sebagai petani.

Karena kurangnya daya kreatifitas dan kemampuan mobilitas kaum nelayan, sehingga perkembangan kondisi penangkapan dan hasil tangkapan sangat rendah walaupun mereka berada dalam daerah yang kaya akan sumberdaya perikanan. Kondisi penangkapan dan hasil penangkapan serta keadaan pemasaran hasil tangkapan nelayan pada waktu itu dikemukakan oleh informan bahwa pada tahun 70-an ikan yang mereka tangkap sangat terbatas jumlah dan jenisnya karena alat tangkap yang mereka gunakan sangat sederhana. Sistem pemasaran yang mereka lakukan pada waktu itu biasanya hanya melakukan sistem tukar menukar dengan kebutuhan yang kami butuhkan misalnya mereka tukar dengan hasil pertanian, ataupun kalau mereka jual harganya sangat murah karena saat itu tidak ada es untuk mengawetkan, jika ada ikan yang hendak dijual mereka segera menjualnya khawatir busuk dan harganya menjadi jatuh atau bahkan tidak ada harganya karena tidak ada yang berminat untuk membelinya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pada saat itu sistem pemasaran nelayan hanya terbatas pada desa mereka. Mulai tahun 1990 produksi perikanan dan wilayah jelajah penangkapan ikan nelayan mengalami perubahan yang sangat signifikan seiring dengan sistem teknologi yang digunakan dan jaringan pemasaran. Keadaan ini juga merupakan pendorong berkembangnya kelompok-kelompok nelayan yang terdiri dari beberapa orang dan diketuai oleh seorang pemilik kapal. Berdasarkan dari hal tersebut maka program PEMP ini dilaksanakan di desa Bajo dengan tujuan dapat meningkatkan taraf kehidupan msyarakat nelayan yang mayoritas hidup di desa tersebut.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dkembangkan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dirjen KP3K Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebagai salah satu program strategis dalam mendukung program Nasional untuk penguatan ekonomi rakyat, secara khusus diperuntukkan bagi masyarakat pesisir di Indonesia. PEMP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandrian masyarakat pesisir melalui pengembangan budaya kewirausahaan, penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), penggalangan partisipasi masyarakat dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya yang berbasis sumberdaya lokal dan berkelanjutan.

Sebagai program jangka panjang program PEMP dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara holistik dan sistimatik sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat yaitu membangun kemandirian dan mengurangi ketergantungan. Oleh karena itu program PEMP diarahkan pada:

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1. Peningkatan kemandirian masyarakat pesisir melalui pengembangan usaha ekonomi, peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM), partisipasi masyarakat,penguatan odal dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir.
2. Peningkatan kemampuan masyarakat pesisir untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut secara optimal, berkelanjutan sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan.
3. Pengembangan kemitraan masyarakat pesisir dengan lembaga swasta dan pemerintah.

Sasaran program PEMP adalah masyarakat pesisir skala mikro yang dibagi dalam dua tahapan sasaran :

1. Sasaran antara, yaitu koperasi (koperasi LEPP-M3 / koperasi perikanan / koperasi lainnya).
2. Sasaran akhir yaitu masyarakat pesisir dengan usaha skala mikro yang berorientasi pada sektor usaha kelautan dan perikanan (seperti kegiatan penangkapan, budidaya, perniagaan hasil perikanan, pengolahan ikan, usaha jasa perikanan serta pengelolaan wisata bahari yang berlokasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil).

UNIVERSITAS TERBUKA

B.2. Program PEMP di Maluku Utara

Sudah banyak program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP). Pada intinya program ini dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

a. **Kelembagaan**. Bahwa untuk memperkuat posisi tawar masyarakat, mereka haruslah terhimpun dalam suatu kelembagaan yang kokoh, sehingga segala aspirasi dan tuntutan mereka dapat disalurkan secara baik. Kelembagaan ini juga dapat menjadi penghubung (*intermediate*) antara pemerintah dan swasta. Selain itu kelembagaan ini juga dapat menjadi suatu forum untuk menjamin terjadinya perguliran dana produktif diantara kelompok lainnya.

b. **Pendampingan**. Keberadaan pendamping memang dirasakan sangat dibutuhkan dalam setiap program pemberdayaan. Masyarakat belum dapat berjalan sendiri mungkin karena ketidaktahuan, tingkat penguasaan ilmu pengetahuan yang rendah, atau mungkin masih kuatnya tingkat ketergantungan mereka karena belum pulihnya rasa percaya diri mereka akibat paradigma-paradigma pembangunan masa lalu. Terlepas dari itu semua, peran pendamping sangatlah vital terutama mendapingi masyarakat menjalankan aktivitas usahanya. Namun yang terpenting dari pendampingan ini adalah menempatkan orang yang tepat pada kelompok yang tepat pula.

c. **Dana Usaha Produktif Bergulir**. Pada program PEMP juga disediakan dana untuk mengembangkan usaha-usaha produktif yang menjadi pilihan dari masyarakat itu sendiri. Setelah kelompok pemanfaat dana tersebut berhasil, mereka harus menyisihkan keuntungannya untuk digulirkan kepada kelompok masyarakat lain yang membutuhkannya. Pengaturan pergulirannya akan disepakati di dalam forum atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sendiri dengan fasilitasi pemerintah setempat dan tenaga pendamping

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Program PEMP telah mengembangkan sejumlah kegiatan untuk mendukung perekonomian masyarakat pesisir di seluruh Kabupaten/Kota. Kegiatan-kegiatan pokok PEMP di Maluku Utara yaitu :

1. Penguatan Usaha Perikanan Tangkap

   Kegiatan ini memberikan dukungan dan fasilitasi pengembangan usaha perikanan tangkap bagi kelompok nelayan. Bentuk dukungan antara lain : pengadaan armada pukat cincin (*purse seine*), armada pancing tonda (*pole and line*), bagan, armada katinting, dukungan alat tangkap, hingga mesin dan suku cadangnya.

2. Pengembangan Sarana Pengolahan Ikan

   Program PEMP mendukung pembangunan sarana pasca tangkap, terutama pada daerah sentra perikanan rakyat yang membutuhkan. Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu : pengadaan mini freezer, sarana pengolahan ikan asin, dan alat pengering ikan.

3. Pembangunan SPDN/SPBU

   Unit Usaha SPDN/SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar) melayani kebutuan bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan dan pembudidaya ikan dengan harga subsidi. SPDN/SPBU telah di bangun di Bacan Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Timur dan Kota Ternate

4. Pendirian BPR Pesisir

   Pendirian BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dimaksudkan untuk mengembangkan lembaga keuangan mikro yang dapat melayani kebutuhan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

finansial masyarakat perdesaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Sampai saat ini baru ada 1 BPR yaitu di Ternate.

5. Kedai Pesisir

   Kedai pesisir merupakan unit usaha untuk melayani kebutuhan bahan pokok dan kebutuhan usaha bagi masyarakat pesisir dalam bentuk *outlet* (toko penjualan) dengan sistem swalayan. Kedai pesisir juga berperan sebagai pemasok barang (*suplier*) bagi warung-warung sejenis disekitarnya. Hingga kini PEMP Maluku Utara telah mebangun 4 unit di Ternate, Sula, Halmahera Barat dan Halmahera Utara.

6. Bengkel Nelayan

   Bengkel nelayan berfungsi melayani kebutuhan perbaikan dan suku cadang armada perikanan rakyat. Di provinsi Maluku utara telah dibangun 1 bengkel nelayan yang bertempat di Ternate.

7. Dukungan ekonomi lainnya

   Sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat nelayan setempat, program PEMP Maluku utara telah mengembangkan dukungan usaha ekonomi alternatif lainnya seperti kios nelayan, kios BBM (Halmahera Timur), waserda dan Unit Simpan Pinjam (Halmahera Utara, serta Bantuan Modal Usaha (Tidore Kepulauan).

   Disamping usaha-usaha ekonomi di atas, program PEMP juga mendukung usaha mandiri warga perdesaan dalam pengelolaan (konservasi atau rehabilitasi) ekosistem pantai, laut dan pulau kecil.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

B.3. Mekanisme Program PEMP

Program PEMP merupakan program nasional yang diselenggaraan di seluruh Indonesia melalui koordinasi Direktorat Departemen Kelautan dan Perikanan. Dalam pelaksanaannya program PEMP dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak di daerah, mulai dari lingkup Provinsi hingga kelompok masyarakat perdesaan, termasuk lembaga adat dan kelompok perempuan.

Secara ringkas, mekanisme komunikasi-koordinasi dan pelaporan program PEMP digambarkan pada Gambar 4.1.

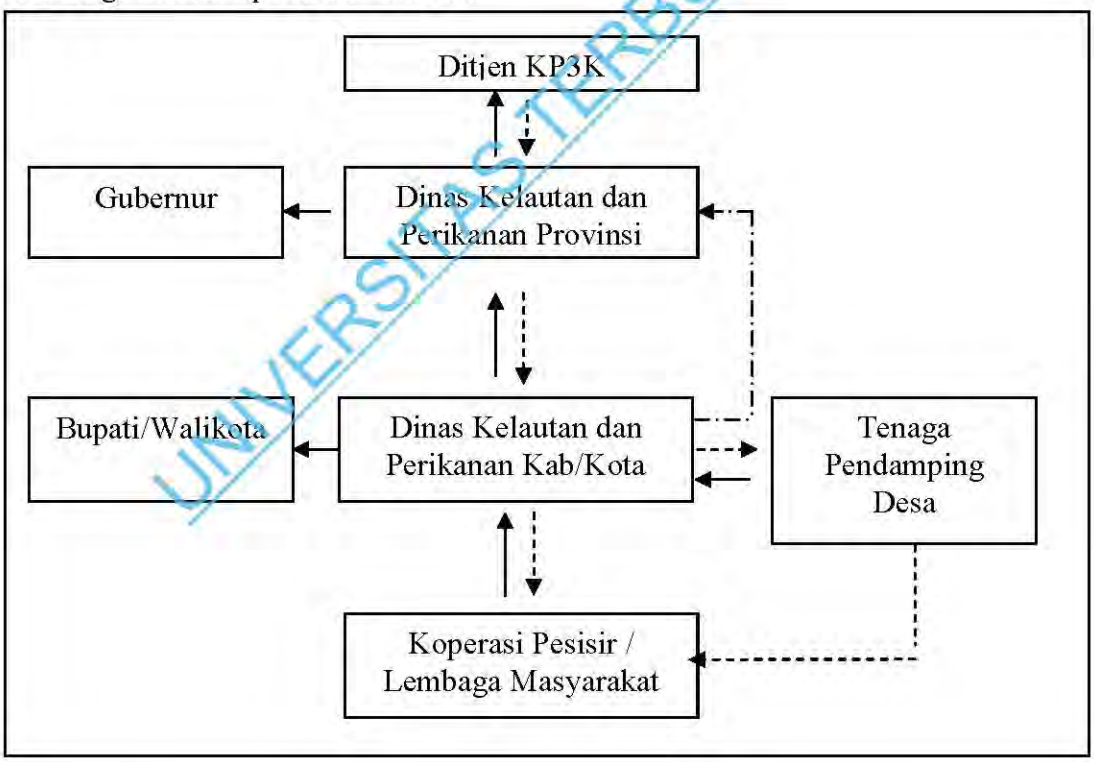

Keterangan
Garis Laporan
Garis Koordinasi
Garis dukungan teknis/program

Gambar 4.1. Mekanisme Program PEMP

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Khususnya di desa Penelitian yaitu Desa Bajo, Program PEMP yang telah dilaksanakan pada tahun 2003 yaitu bantuan armada penangkapan tuna sebanyak 10 unit dan bantuan alat penunjang penangkapan ikan yaitu berupa mesin, bantuan bagan dan sarana pengeringan ikan.

Berdasarkan hasil kuisioner di ketahui bahwa pada umumnya masyarakat nelayan yang mendapatkan bantuan PEMP sangat terbantu akan bantuan tersebut dan ini secara serta merta membantu kelancaran usaha mereka. Hal ini dapat kita lihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Persentasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Nelayan Penerima Bantuan PEMP yang dikucurkan di Desa Bajo Kab. Halmahera Selatan

Tingkat Kepuasan	Jumlah Responden	Persentase (%)
Rendah	0	0
Sedang	15	30
Sangat Puas	35	70
Jumlah	50	100

Data Primer setelah diolah (2009)

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat nelayan penerima bantuan sangat puas atas bantuan PEMP yang diberikan pada mereka. Hal ini menunjukkan bahwa program PEMP yang dilaksanakan di desa Bajo telah dapat membantu masyarakat nelayan khususnya untuk membantu usaha ekonomi mereka.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tingkat kepuasan masyarakat nelayan ini diukur dengan indikator seberapa besar bantuan itu dapat dirasakan manfaatnya khususnya dalam membantu usaha ekonomi mereka. Berdasarkan indikator ini menunjukkan bahwa peran PEMP yang bertujuan untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat penerima program bantuan PEMP tersebut.

C. Efektifitas Pelaksanaan PEMP dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pesisir

Tingkat efektivitas program PEMP dinilai dari tingkat produktivitas program PEMP. Tingkat produktivitas adalah (1) kesesuaian antara program dengan pelaksanaan, (2) dampak program PEMP terhadap peningkatan pendapatan masyarakat penerima PEMP.

Produktivitas Program PEMP

Produktivitas program PEMP terdiri dari tingkat (1) kesesuaian program dengan pelaksanaan administratif dan, (2) dampak program PEMP terhadap pendapatan masyarakat.

1. Kesesuaian Antara Program dan Pelaksanaan

Program dan pelaksanaan program PEMP dimuat dalam kebijakan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dirjen KP3K Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebagai salah satu program strategis dalam mendukung program Nasional untuk penguatan ekonomi rakyat. Secara khusus

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

program ini diperuntukkan bagi masyarakat pesisir di Indonesia, khususnya di desa Bajo Provinsi Maluku Utara program tersebut dimaksudkan untuk mendukung peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat setempat yang pada umumnya masih hidup dalam taraf kemiskinan.

Kebijakan pelaksanaan program PEMP yang dilaksanakan di desa Bajo meliputi; Penguatan usaha tangkap, Pengembangan Sarana Pengolahan Ikan dan dukungan ekonomi lainnya. Pada umumnya semua kebijakan PEMP yang menjadi program dan pelaksanaan bantuan dukungan ekonomi lainnya dibuat berdasarkan (1) pertimbangan untuk apa bantuan tersebut diluncurkan, (2) ketentuan umum, (3) tujuan dan sasaran, (4) persyaratan calon penerima, (5) seleksi KSP/USP calon penerima dana, (6) tatacara pencairan bantuan, (7) penjaminan pelaksanaan program, (8) tugas (9) monitoring dan evaluasi, (10) pengendalian dan (11) ketentuan peralihan. Hal ini telah dilaksanakan di desa Bajo dan dalam perkembangannya pelaksanaan prosedur sebagai kriteria penerima bantuan telah dijalankan sesuai dengan prosedur namun berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa kepala keluarga desa tersebut, keluarga yang seharusnya lebih memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan tersebut malah tidak menerima bantuan. Menurut mereka faktor hubungan kerabat dan pertemanan juga menjadi factor penentu dalam penentuan kepala keluarga yang menjadi penerima bantuan.

Menyikapi hal tersebut diatas menurut peneliti seharusnya dalam pelaksanaan penentuan penerima bantuan seharusnya berdasarkan data tingkat kebutuhan masyarakat terhadap bantuan tersebut dan hal ini dapat ditunjang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dengan data dari kantor desa setempat bagaimanan kondisi masyarakat setempat sehingga bantuan ini betul-betul menyentuh masyarakat yang sangat membutuhkan.

Mekanisme pelaksanaan program PEMP khususnya pemberian modal untuk usaha kecil menengah adalah (1). Tahap perencanaan dilaksanakan sebagai berikut: (a) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) mengajukan proposal kebutuhan bantuan perkuatan kepada Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan melampirkan AD,NPWP,SIUP, surat keterangan tenaga ahli, surat keterangan domisili,rencana usaha dan rekomendasi dariPemerintah Kab/Kota setempat; (b) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan pembahasan,penilaian dan penganggaran atas usulan Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah; (c) Pemerintah memberikan persetujuan program dan anggaran dalam tahun anggaran yang bersangkutan yang dituangkan dalam DIP.

Berdasarkan hasil data kuisioner terhadap 50 responden didapatkan bahwa tingkat manfaat yang dirasakan responden terhadap program PEMP adalah sekitar 38 orang atau 76 % merasakan bahwa program tersebut sangat bermanfaat dan sekitar 12 orang atau 24 % merasakan manfaat tersebut dalam taraf sedang dan dari jumlah responden tersebut menunjukkan bahwa program PEMP tersebut bermanfaat bagi mereka. Di lain pihak setelah melakukan wawancara dengan kepala keluarga yang tidak menerima program PEMP, mereka sangat mengharapkan agar program tersebut bukan hanya mengakomodir sebagian warga masyarakat saja tapi setidaknya menyentuh semua keluarga yang ada pada desa penelitian. Menurut mereka terlihat jelas adanya perbedaan pendapatan dan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

produksi bagi mereka yang meneruma program PEMP dan yang tidak menerima Program PEMP tersebut, khususnya pada pemberian bantuan alat tangkap.

Tahap implementasi administrasi bantuan berupa uang diatur sebagai berikut: (a) KUKM menyampaikan permohonan pencairan dan kepada Deputi Bidang Produksi, Kementerian KUKM, Kemeterian KUKM melampirkan dokumen detail rencana kerja, jadwal pelaksanaan, spesipikasi sarana atau barang modal yang akan diadakan, surat pernyataan kesanggupan yang bersangkutan dibuat dengan akte otentik atau diketahui Dinas yang menangani bidang KUKM. Anggaran Dasar Koperasi UKM, NPWP/SIUP/TDP, profil perusahaan dan data pendukung lainnya, (b) Menteri atau pejabat yang ditunjuk menetapkan KUKM penerima bantuan perkuatan dibidang usaha tertentu, (c) pemimpin proyek menyerahkan semua permohonan sebagaimana disebut diatas beserta pedoman teknis bantuan perkuatan dibidang usaha tertentu kepada Kantor Perbendaharaan Kas negara (KPKN), (d) KPKN memeriksa berkas sebagaimana dan mencairkan dana ke rekening KUKM bersangkutan.

Prosedur pemberian bantuan berupa uang dalam rangka penguatan modal bagi masyarakat setempat, kadang terkendala oleh beberapa faktor diantaranya masyarakat desa Bajo pada umumnya dengan tingkat pendidikan yang rendah masih merasa segan untuk berurusan dengan segala hal khususnya yang berhubungan dengan permasalahan administrasi seperti harus membuat penyataan dalam bentuk tertulis, dan pengurusan beberapa berkas yang berhubungan dengan keluar masuk kantor desa setempat. Mereka masih menganggap bahwa hal itu menjadi beban dan ada rasa was-was ketika dana itu harus dikembalikan secara

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

bertahap sementara resiko hasil penangkapan mereka yang fluktuatif sehingga tidak dapat menentukan secara pasti penghasilan mereka apalagi ditambah harus membayar ansuran pinjaman bantuan modal tersebut.

Hasil identifikasi kebijakan atau perencanaan dan pelaksanaan administrasi Program PEMP dapat disimpulkan bahwa :

(1) Semua kebijakan di bidang produksi berkaitan dengan penyelenggaraan program PEMP di desa Bajo yang di berikan bertujuan untuk memberdayakan dan mengembangkan usaha koperasi dan kelompok nelayan sesuai dengan komoditi yang di tangani. Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya program PEMP ini telah mengembangkan usaha koperasi khususnya pengembangan usaha kelompok nelayan karena bantuan ini diberikan pada kelompok nelayan yang masing-masing mempunyai 10 anggota kelompok. Usaha koperasi menjadi lebih berkembang karena dengan bantuan tersebut yang disalurkan melalui koperasi membantu koperasi lebih berdaya guna dalam mengelola dana tersebut untuk pengembangan usaha kelompok nelayan.

(2) Pada dasarnya sumber dan mekanisme PEMP sama untuk semua kegiatan yang di programkan yaitu bersumber dari APBN, di sediakan melalui anggaran proyek pengembangan kebijakan peningkatan produktivitas yang petunjuk pemberiannya di atur melalui kebijakan per komoditi. Program PEMP yang dilakukan di Desa Bajo dilakukan mengikuti prosedur dan petunjuk yang diatur dan berdasarkan kebijakan per komoditi. Didesa Bajo yang menjadi fokus kegiatan PEMP yaitu pengembangan usaha perikanan tangkap dengan komoditi

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

ikan cakalang sehingga bantuannya berupa pengadaan alat tangkap Pole and Line bagi 10 kelompok nelayan dan bantuan alat pengolahan ikan yaitu pembuatan kerupuk kamplang oleh masyarakat setempat.

(3) mekanisme pencairan dana bantuan untuk semua kegiatan sama yaitu koperasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas setempat tetapi ada yang melalui persetujuan Bupati setempat. Kemudian daftar koperasi tersebut di ajukan ke Kementerian koperasi dan UKM untuk mendapatkan persetujuan dari Pusat. Selanjutnya Koperasi mengadakan perikatan dengan rekanan atau pihak ketiga. Penetapan pihak ketiga atau rekanan terlebih dahulu di koordinasikan dengan Kementerian KUKM (Pasal 3 ayat 1G. Kepmen KUKM No 58.1/VI/2003). Di desa Bajo pencairan dana dilakukan di Koperasi desa setempat dan para nelayan melakukan pencairan melaui koperasi tersebut berdasarkan prosedur yang telah ditentukan.

(4) dana bantuan disalurkan oleh proyek melalui rekening yang ditujukan oleh masing-masing koperasi primer penerima bantuan pada Bank setempat yang ditunjuk. Nama koperasi di desa Bajo yang ditunjuk sebagai pengelola dana yaitu koperasi LEPP M3 Halmahera Selatan dan Bank yang menyalurkan yaitu Bank Rakyat Indonesia cabang Bacan Halmahera Selatan.

(5) dana tersebut di pergunakan oleh koperasi untuk pengadaan pengembangan komoditas yang sudah di tentukan. Di desa Bajo dikhususkan untuk program bantuan alat tangkap dan alat pengolahan ikan.

Selanjutnya hasil identifikasi menemukan beberapa kelemahan dalam program PEMP khususnya pada desa penelitian, yaitu desa Bajo Kabupaten

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Halmahera Selatan yaitu:(1) tidak adanya ciri atau spesifikasi khusus bagi penerima bantuan, (2) sanksi untuk semua pelaku dalam kegiatan kurang kuat untuk mengawali dan berlangsungnya kegiatan. Sanksi yang ada hanya pada koperasi dan penerima bantuan .Sedangkan bagi pelaku lain tidak ada, apakah bantuan tersebut sampai secara tepat jumlah, mutu, waktu dan tempat yang ditentukan. (3) status bantuan hingga kapan dan kepada siapa belum jelas diatur dan (4) diantara program masih ditemukan ada program yang sudah menerima, namun karena bantuan tersebut masih kurang untuk mewujudkan tujuan yang ditentukan, maka kegiatan belum dilanjutkan kasus bantuan dana bantuan operasional penangkapan ikan.

Pada umumnya pelaksanaan bantuan untuk kelompok nelayan di lapangan ada yang sesuai, kurang sesuai dan tidak sesuai dengan program dan implementasi administratif. Bagi pemberian bantuan alat tangkap yang pelaksanaan di kategorikan sesuai tentunya diharapkan mencapai tujuan. sedangkan yang kurang sesuai dan tidak sesuai, di harapkan untuk mendapat perbaikan dan penyempurnaan program dan pelaksanaan.admintratif dan pelaksanaan di lapangan.

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan di lapangan, di kumpulkan beberapa pertanyaan yang dilakukan dengan wawancara mendalam kepada beberapa kelompok nelayan yang pernah menerima dana PEMP dan yang belum pernah menerima bantuan PEMP hal ini dimaksudkan agar dapat menggambarkan apakah pelaksanaan sesuai dengan program. Dari hasil wawancara dilokasi penelitian terdapat beberapa kasus yang terjadi di lapangan ditemukan beberapa

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

hal sebagai berikut : (1) dana sudah diterima oleh koperasi tetapi alat dan bahan dan lainnya kurang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, misalnya kualitas alat tangkap yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. (2) terdapat beberapa kasus penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi (di koperasi), (3) adanya ketidak tepatan penerima bantuan atau kelemahan dalam seleksi penerima bantuan dan (4) monitoring dan evaluasi program belum berjalan sebagaimana mestinya.

Dari hasil kuisioner menunjukkan bahwa dengan adanya bantuan PEMP telah dapat meningkatkan produktifitas usaha ekonomi nelayan. Berdasarkan hasil penelitian rata-rata tingkat produksi ikan nelayan sebelum menerima bantuan PEMP yaitu 200-350 kg sekali melaut dan setelah menerima bantuan PEMP produksi ikan nelayan meningkat menjadi 1000 kg.

Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan produksi ikan secara signifikan sebelum dan sesudah adanya bantuan armada perikanan tangkap. Kondisi ini terjadi karena sebelum mereka menerima bantuan berupa sarana alat tangkap meraka hanya mengandalkan alat tangkap skala tradisional yang daerah jelajahnya terbatas dan kemampuan produksi yang rendah.

Tabel 4.7. menggambarkan tingkat pendapatan masyarakat nelayan sebelum dan sesudah menerima bantuan PEMP berdasarkan hasil kuisioner yang dijawab oleh 50 responden penerima bantuan PEMP :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.7 Tingkat Pendapatan Nelayan Penerima Bantuan PEMP, Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan

Jumlah Responden (Org)	Rata - Rata Tingkat Pendapatan Nelayan Penerima PEMP	
	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
17	250.000 - 350.000	600.000 – 750.000
15	400.000 - 600.000	750.000 – 1.000.000
18	650.000 - 750.000	1.000.000 - 1.500.000

Sumber : Data Primer setelah diolah (2009)

Berdasarkan hasil kuisioner dan wawancara mendalam terhadap beberapa responden diungkapkan bahwa dari rata-rata pendapatan mereka sebelum menerima PEMP yaitu sekitar Rp 500.000 per kepala keluarga dengan rata-rata jumlah tanggungan 6 orang. Jika nilai tersebut dikonversi ke harga beras senilai Rp. 5.000/kg yaitu hanya sekitar 200 kg beras/org perkapita pertahun. Nilai ini masuk kategori 2 yaitu miskin sekali menurut Sayogyo (1983).

Menurut Sayogyo (1983) yang melakukan penelitian kemiskinan berdasarkan tingkat pendapatan perkapita pertahun ke dalam kilogram beras, berdasarkan rata-rata pendapatan pertahun, maka rata-rata pendapatan mereka setelah menerima PEMP yaitu sekitar Rp 1.000.000 per kepala keluarga dengan rata-rata jumlah tanggungan 6 orang. Jika nilai tersebut dikonversi ke harga beras senilai 6.000 rp/ liter yaitu hanya sekitar 333 kg beras/ org perkapita pertahun. Nilai ini masuk kategori tidak miskin menurut Sayogyo (1983).

Rata-rata terjadi peningkatan pendapatan namun itu belum sesuai dengan tingkat kebutuhan hidup mereka. Selain itu ditambah biaya operasional usaha mereka yang semakin meningkat akibat naiknya harga BBM yang secara

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

signifikan mengakibatkan peningkatan harga kebutuhan pokok yang harus tersedia setiap hari.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi pendapatan taraf hidup nelayan penerima PEMP dapat ditingkatkan kehidupannya. Namun nilai pendapatan ini masih dalam taraf belum maksimal melepaskan mereka dari belenggu kemiskinan karena belum dapat memenuhi tingkat kebutuhan mereka.

Berdasarkan data penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat efektifitas program PEMP dinilai dari (1) kesesuaian antara program dengan pelaksanaan, (2) produktivitas usaha (3) dampak terhadap tingkat pendapatan masyarakat setelah menerima program PEMP adalah :

1) Kesesuaian antara program dan pelaksanaan dapat dikatakan belum sesuai sepenuhnya terlihat dari adanya beberapa kasus yang muncul dalam pelaksanaan. Hal ini ditunjukkan dari beberapa hasil wawancara dilokasi penelitian terdapat beberapa kasus yang terjadi dilapangan yaitu : (1) dana sudah diterima oleh koperasi tetapi alat dan bahan dan lainnya kurang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Misalnya kualitas alat tangkap yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. (2) terdapat beberapa kasus penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi (di koperasi), (3) adanya ketidaktepatan penerima bantuan atau kelemahan dalam seleksi penerima bantuan dan (4) monitoring dan evaluasi program belum berjalan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2) Produktivitas usaha perikanan termasuk dalam kategori sedang karena terlihat ada peningkatan produksi namun belum optimal dalam pemanfaatannya Dari hasil kuisioner menunjukkan dengan adanya bantuan PEMP telah dapat meningkatkan produktifitas usaha ekonomi nelayan, ini dapat terlihat dari hasil produksi penangkapan nelayan yang sebelum menerima bantuan armada penangkapan dari PEMP hanya mampu berproduksi 250 -350 kg namun setelah menerima bantuan meningkatkan kemampuan produksinya hingga 1000- 1500 kg. Namun nilai produksi ini masih dalam kategori sedang ketika hal itu belum merupakan nilai produksi optimal yang mampu ia peroleh.
3) Dampak program terhadap peningkatan pendapatan terlihat ada peningkatan namun belum maksimal sesuai yang diharapkan. Dari hasil kuisioner menunjukkan terjadi peningkatan pendapatan menurut kriteria Sayogyo (1983) yaitu sebelum menerima bantuan PEMP tingkat pendapatan mereka sekitar 200 kg beras/org perkapita pertahun masuk kategori 2 yaitu miskin sekali, setelah menerima PEMP pendapatan mereka sekitar 333 kg beras/ org perkapita pertahun masuk kategori tidak miskin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi pendapatan taraf hidup nelayan penerima PEMP dapat ditingkatkan kehidupannya, namun nilai pendapatan ini masih dalam taraf belum maksimal melepaskan mereka dari belenggu kemiskinan karena belum dapat memenuhi tingkat kebutuhan mereka, karena tingkat harga kebutuhan pokok dipasaran yang semakin naik.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

D. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan untuk Meningkatkan Kesejahteraan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Desa Bajo Kabupaten Halmahera Selatan

Untuk memberi arahan strategi bagi kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraannya dalam pengelolaan wilayah peisisir di Desa Bajo Kabupaten Halmahera Selatan dilakukan dengan analisis SWOT dengan melihat faktor eksternal dan internal. Lingkungan eksternal adalah peluang dan ancaman (*Opportunities* dan *Threats*) yang memberi pengaruh positif, sedangkan lingkungan internal kekuatan dan kelemahan (*Strengths* dan *Weaknesses*) yang memberi pengaruh negatif. Pada analisis SWOT dilakukan pembobotan dan scoring terhadap setiap faktor. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa dari total skor internal bernilai 2,80 terdiri dari pengaruh faktor kekuatan berjumlah 1,65 dan pengaruh faktor kelemahan dengan nilai 1,15. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.8 :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel. 4.8. Hasil Skor Faktor Strategi Internal.

Faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Skor	Keterangan
Kekuatan (*Strengths*) Potensi Sumberdaya Perikanan di Halmahera Selatan yang besar.	0,20	3	0,60	Halmahera Selatan mempunyai standing stock ikan sebesar 100.750,08 ton/tahun, dengan MSY sebesar 113.343,04 ton/tahun.
Potensi SDM secara kuantitas sebagai pelaku usaha perikanan.	0,15	3	0,45	Sekitar 596 KK atau 61,51% dari 969 KK berprofesi sebagai nelayan.
Adanya lembaga social nelayan yang mendukung usaha perikanan (kelompok nelayan)	0,10	3	0,3	Dilokasi Penelitian terbentuk lembaga sosial masyarakat dalam bentuk kelompok-kelompok nelayan
Keberadaan Dinas Perikanan sebagai intansi terkait pengelolaan perikanan.	0,10	2	0,2	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halsel yang merupakan instansi yang berperan dalam Pengelolaan SDP Halsel.
Keberadaan Koperasi LPPM3 Bacan yang mendukung usaha perikanan	0,05	2	0,1	Adanya Koperasi LPPM3 Bacan yang berperan sebagai lembaga ekonomiyang membantu usaha nelayan.
			1,65	
Kelemahan (*Weaknesses*) Belum Optimalnya Pemanfaatan SDI di Halmahera Selatan	0,10	3	0,30	Tingkat pemanfaatan Sumberdaya Perikanan masih sekitar 10% dari MSY.
Rendahnya SDM sehingga masih susah untuk melakukan peningkatan skala usaha dan mengadopsi teknologi yang lebih	0,10	3	0,30	Sekitar 535 orang atau 23,02 % dari 2325 orang penduduk lokasi penelitian hanya merupakan tamatan SD.

UNIVERSITAS TERBUKA

maju.				
Akses keterjangkauan sarana dan prasarana alat tangkap masih sangat terbatas.	0,05	3	0,15	Armada penangkapan di lokasi penelitian mayoritas (51%) adalah perahu tanpa motor.
Akses permodalan yang masih terbatas sehingga kemampuan peningkatan usaha masih terhambat.	0,10	3	0,30	Masyarakat nelayan setempat masih mengandalkan meinjam pada dibo-dibo untuk operasional penangkapan mereka.
Masih adanya praktek penangkapan yang tidak ramah lingkungan sehingga mengancam ekosistem pesisir.	0,05	2	0,10	Masih ada temuan dilokasi penangkapan kegiatan penangkapan dengan cara mengebom, hal ini dapat merusak terumbu karang juga ikan-ikan kecil ikut mati
			1,15	
Total	**1,00**		**2,80**	

Sumber: Data Primer diolah

Untuk Faktor eksternal, total skor bernilai 2,65 yang berasal dari faktor peluang senilai 1,60 dan faktor ancaman senilai 1,05. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.9:

91-96

Tabel 4.9. Hasil Skor Faktor Strategi Eksternal

Faktor Strategi Eksternal	Bobot	Rating	Skor	Keterangan
Peluang (*Opportunities*)				
Peningkatan PAD	0,10	3	0,30	Dengan peningkatan hasil perikanan diharapkan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

				berkonstribusi pada peningkatan PAD.
Peningkatan Produksi (peluang ekspor)	0,15	3	0,45	Dengan memanfaatkan potensi perikanan secara optimal dapat menigkatkan produksi perikanan dan merupakan peluang ekspor.
Perkembangan informasi dan teknologi penangkapan semakin pesat	0,05	3	0,15	Perkembangan Informasi dan Teknologi semakin pesat dan semakin cepat diakses.
Kebutuhan akan sumberdaya perikanan semakin meningkat sebagai pengganti kebutuhan protein hewani.	0.10	3	0,30	Kebutuhan akan perikanan semakin meningkat dengan trend kesehatan manusia sekarang yang mengganti protein hewani menjadi potein ikan.
Peluang diversifikasi usaha perikanan	0,10	3	0,30	Kondisi perairan Halmahera Selatan yang potensial untuk pengembangan usaha budidaya laut.
Keindahan alam bawah laut sebagai peluang wisata bahari	0,05	2	0,10	Keindahan panorama alam dan keindahan panorama bawah laut Halsel yang kaya akan ekosistem terumbu karang dan ikan hias yang beragam sebagai potensi bahari.
			1,60	
Ancaman (*Threats*) Penurunan kualitas lingkungan pesisir	0,15	3	0,15	Peningkatan penduduk dan aktifitas manusia di wilayah pesisir dapat menurunkan kualitas ekosistem pesisir.
Konflik pemanfaatan daerah penangkapan	0,10	2	0,20	Dengan semakin tingginya aktifitas penangkapan dan jumlah nelayan yang ikut melakukan operasi penagkapan ikan di Kabupaten Halsel dapat menimbulkan konflik pemanfaatan daerah

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

				penangkapan apalagi dengan berlakunya otonomi daerah.
Harga Ikan fluktuatif dan daya tawar produsen lemah	0,05	3	0,15	Pada saat musim ikan kadang harga ikan menurun dilain pihak pada saat ikan kurang harga akan naik hal ini menyebabkan harga ikan tidak stabil, dilain pihak ketergantungan pinjaman nelayan pada Dibo-dibo menyebabkan daya tawar hasil ikan mereka menjadi rendah.
Kondisi alam yang tidak menentu	0,05	2	0,10	Kegiatan penangkapan ikan merupakan kegiatan yang beresiko tinggi karena pada saat musim barat dimana intensitas curah hujan tinggi dan angin kencang nelayan tidak dapat melaut.
Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung usaha nelayan.	0,05	3	150,	Pada lokasi penelitian belum terdapat TPI sebagai tempat pelelangan ikan yang dapat membantu kelancara usaha nelayan.
			1,05	
Total	**1,00**		**2,65**	

Sumber: Data Primer setelah diolah (2009)

Dari informasi pada Tabel 4.8. dan 4.9, dilakukan perbandingan dan pertimbangan antara faktor ekternal dan internal. Selanjutnya ditentukan strategi yang paling tepat bagi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraannya dalam pengelolaan wilayah pesisir di Desa Bajo Kabupaten Halmahera Selatan. Dari hasil ini dapat dijelaskan bahwa strategi yang paling tepat bagi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan adalah memaksimalkan kekuatan dengan peluang-peluang yang ada melalui bergesernya permintaan akan ikan sebagai sumber protein adalah peningkatan kesempatan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kerja dan berusaha (SO), Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia (WO), Peningkatan Kelembagaan (ST), dan pemberdayaan masyarakat pesisir (WT). Arahan strategi dapat berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat pesisir. Hasil interaksi antara faktor eksternal dan internal dapat disajikan pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Interaksi antara Faktor ekternal dan internal

Internal / Eksternal	**KEKUATAN (S)**	**KELEMAHAN (W)**
	1.Potensi Sumberdaya Perikanan di Halmahera Selatan yang besar. 2.Potensi SDM secara kuantitas sebagai pelaku usaha perikanan. 3.Adanya lembaga social nelayan yang mendukung usaha perikanan (kelompok nelayan) 4. Keberadaan Dinas Perikanan sebagai intansi terkait pengelolaan perikanan. 5. Keberadaan Koperasi LPPM3 Bacan yang mendukung usaha perikanan	1. Belum optimalnya pemanfataan SDI di Halsel 2. Rendahnya SDM sehingga masih susah untuk melakukan peningkatan skala usaha dan mengadopsi teknologi yang lebih maju. 3. Akses keterjangkauan sarana dan prasarana alat tangkap masih sangat terbatas. 4. Akses permodalan yang masih terbatas sehingga kemampuan peningkatan usaha masih terhambat. 5. Masih adanya praktek penangkapan yang tidak ramah lingkungan sehingga mengancam ekosistem pesisir.
PELUANG (O) 1. Peningkatan PAD 2. Peningkatan produksi hasil tangkapan (peluang ekspor) 3. Perkembangan informasi dan teknologi semakin pesat 4. Kebutuhan akan	**STRATEGI (SO)** 1. Optimalisasi pemanfataan SDP . 2. Peningkatan kapasitas produksi perikanan dengan pengembangan alat tangkap yang lebih maju dan ramah lingkungan. 3. Mengembangkan usaha masyarakat dengan	**STRATEGI (WO)** 1. Peningkatan produksi dengan peningkatan kualitas SDM dengan pelatihan dan magang 2. Peran Pemda untuk memberikan sosialisasi diversifikasi usaha 3. Peran pemda dalam menyediakan prasarana

UNIVERSITAS TERBUKA

sumberdaya perikanan semakin meningkat sebagai pengganti kebutuhan protein hewani. 5. Peluang diversifikasi usaha perikanan 6. Keindahan alam bawah laut sebagai peluang wisata bahari	mengenalkan diversifikasi usaha untuk peningkatan pendapatan. 4. Memperkenalkan peluang pengembangan wisata bahari sebagai bentuk pengembangan usaha masyarakat setempat. 5. Program kegiatan dinas perikanan yang mendukung pengembangan usaha nelayan dan peningkatan tingkat kesejahteraan nelayan.	dan sarana yang mendukung usaha nelayan. 4. Kepedulian pihak perbankan untuk membantu modal nelayan 5. Peran instansi terkait untuk mensosialisasikan jenis alat tangkap yang ramah lingkungan dan melarang kegiatan penangkapan yang dapat merusak lingkungan.
ANCAMAN (T) 1. Penurunan kualitas lingkungan pesisir 2. Konflik pemanfaatan daerah penangkapan 3. Kondisi alam yang tidak menentu 4. Harga Ikan fluktuatif dan daya tawar produsen lemah 5. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung usaha nelayan.	**STRATEGI (ST)** 1. Pengelolaan SDP secara berkelanjutan. 2. Penguatan kelembagaan nelayan untuk mendukung usaha nelayan dan pelestarian lingkungan 3. Peran kelembagaan masyarakat nelayan yang mendukung usaha nelayan 4. Menciptakan Pola Kemitraan Usaha	**STRATEGI (WT)** 1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 2.Sosialisasi dan intervensi dari pemerintah untk memberikan pemahaman pentingnya menjaga lingkungan perairan. 3. Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang usaha nelayan

Sumber : Data Primer Setelah diolah (2009)

Dari beberapa alternatif strategi, kemudian dianalisis keterkaitan antar fakor dan nilai bobot. Kemudian ditentukan prioritas alternatif strategi berdasarkan besar jumlah bobot: Pertama peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, kedua peningkatan sumberdaya manusia, ketiga peningkatan kelembagaan dan keempat pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan dapat memberikan manfaat serta keuntungan kepada mereka berupa peningkatan kesempatan kerja dan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

berusaha (SO). Strategi ini dapat ditingkatkan karena adanya peluang pemanfaatan potensi SDI, adanya diversifikasi usaha sehingga berimplikasi membuka kesempatan kerja dan berusaha. Pembangunan perikanan yang dilaksanakan hendaknya dapat mengurangi pengangguran dan menumbuhkan tenaga kerja baru (*pro job*), hal ini sesuai dengan program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah.

Mengingat tingkat pendidikan/keterampilan yang rendah maka diperlukan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (WO) berupa penyuluhan/sosialisasi dan pelatihan agar dapat bersaing. Sumberdaya manusia harus disiapkan dan ditingkatkan kemampuannya untuk menunjang dan memanfaatkan teknologi penangkapan ikan yang semakin modern. Dengan adanya sumberdaya manusia yang berkualitas maka sumberdaya ikan dapat terkelola dengan baik dan optimal, terutama wilayah perairan yang selama ini belum dimanfaatkan oleh nelayan. Dengan mengelola perairan tersebut maka nilai jual hasil tangkapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir (*pro growth*).

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan peningkatan kelembagaan yang ada di masyarakat pesisir agar diperoleh perbaikan terhadap pelestarian lingkungan berupa sumberdaya ikan dan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat (ST). Peran lembaga sosial sangat diharapkan dalam mendukung upaya yang telah digalakkan pemerintah yaitu usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang ramah lingkungan.

Strategi ini diharapkan agar pemerataan hasil pemanfaatan perikanan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat pesisir,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sehingga dapat berimplikasi pada pengelolaan maka diperlukan pemberdayaan masyarakat pesisir (WT). Pemberdayaan komunitas nelayan harus dilakukan dengan tepat dan disesuaikan dengan kultur yang ada. Penekanannya pada peningkatan kesadaran akar masalah dan potensi yang ada di dalam dan sekitar komunitas.

Program kegiatan yang disarankan yaitu agar digalakkannya hubungan kemitraan pihak swasta (investor) dengan masyarakat lokal, terutama bantuan yang sifatnya mendukung usaha yang kondusif terhadap kelangsungan usaha di kawasan desa Bajo. Adanya keterlibatan masyarakat dalam bentuk kelembagaan seperti Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Koperasi Unit Desa (KUD) dan keikut sertaan tokoh-tokoh masyarakat juga dapat mengeliminir terjadinya konflik antara pemerintah, pengelola dan masyarakat pesisir dalam mengembangkan perikanan.

Pelibatan masyarakat pesisir dapat menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab terhadap keberadaan sumberdaya ikan di laut maupun menciptakan iklim yang nyaman dan sehat untuk berusaha. Kondisi ini sangat menguntungkan sebab dapat membuka peluang kerja dan berusaha bagi masyarakat pesisir untuk ikut berpartisipasi dalam industri perikanan tangkap.

Kelembagaan yang ada di kabupaten Halmahera Selatan seperti: Lembaga Ekonomi Pengembangan pesisir Mikro Mitra Mina (LEPPM3), dan lembaga keuangan pemerintah, diharapkan dapat mengangkat masyarakat pesisir dari ketidakberdayaan baik terhadap permodalan maupun posisi tawar yang rendah. Kelembagaan pemerintah sebagai pengelola keuangan baik pemerintah pusat

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

maupun pemerintah daerah dituntut saling koordinasi dalam mengoptimalkan pengelolaan SDI dan pesisir dapat dinikmati oleh masyarakat pengguna khususnya nelayan buruh yang semakin tersisih dari persaingan usaha, permodalan dan keterampilan.

Berdasarkan arahan strategi di atas masalah ketimpangan-ketimpangan dalam masyarakat nelayan harus segera diatasi agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan. Salah satu di antaranya yang sekarang sedang mendapat banyak perhatian adalah konsep pemberdayaan. Ada beberapa prinsip yang perlu dikemukakan untuk mengantar pada pokok pembahasan.

Dasar pandangannya adalah bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat. Bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamisasikan potensi, dengan kata lain, memberdayakannya.

Potensi ekonomi rakyat ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya. Dengan demikian, rakyat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis. Rakyat miskin atau yang berada pada posisi belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya. Dengan demikian, dapatlah diartikan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dalam kerangka pikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi. **Pertama**, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang *(enabling)*. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat *(empowering)*. Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan *(input)*, serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang *(opportunities)* yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian *(charity)* karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. Permberdayaan ekonomi rakyat adalah tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, juga merupakan tanggung jawab masyarakat, terutama mereka yang telah lebih maju, karena telah terlebih dahulu memperoleh kesempatan bahkan mungkin memperoleh fasilitas yang tidak diperoleh kelompok masyarakat lain. Salah satu strategi agar yang kuat membantu yang lemah adalah dengan melalui kemitraan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pada umumnya masyarakat nelayan yang mendapatkan bantuan PEMP sangat terbantu akan bantuan tersebut, dan sebagai akibatnya membantu kelancaran usaha mereka. Hal ini sesuai dengan dengan salah satu tujuan program PEMP yaitu membantu usaha ekonomi masyarakat pesisir.
2. Tingkat efektifitas program PEMP dinilai dari (1) kesesuaian antara program dengan pelaksanaan, (2) produktivitas usaha (3 dampaknya terhadap tingkat pendapatan masyarakat setelah menerima program PEMP adalah :
   (1). Kesesuaian antara program dan pelaksanaan dapat dikatakan belum sesuai sepenuhnya terlihat dari adanya beberapa kasus yang muncul dalam pelaksanaan
   (2). Produktivitas usaha perikanan termasuk dalam kategori sedang karena terlihat ada peningkatan produksi namun belum optimal dalam pemanfaatannya
   (3). Dampak program terhadap peningkatan pendapatan terlihat ada peningkatan namun belum maksimal sesuai yang diharapkan.
3. Strategi yang paling tepat bagi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan adalah memaksimalkan kekuatan dengan peluang-peluang yang ada melalui menggali potensi ekonomi rakyat dan diarahkan untuk meningkatkan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

produktivitas rakyat, sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya. Dengan demikian, rakyat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis. Rakyat miskin atau yang berada pada posisi belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya.

B. Saran

Diharapkan kepada instansi terkait agar dalam pemberian bantuan hendaknya menyesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat, sehingga bantuan tersebut tepat guna dan efektif dalam pelaksanaannya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

DAFTAR PUSTAKA

Bengen. D.G. (2001). *Pengenalan dan pengelolaan ekosistem mangrove.pusat kajian sumberdaya pesisir dan lautan*, IPB. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan,IPB.

BMG. (2008). *Tipe Iklim Maluku Utara.* Ternate: Badan Meteorologi dan Geofisika Propinsi Maluku Utara.

BPS. (2008). *Halmahera Selatan dalam angka.* Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Bappeda Kabupaten Halmahera Selatan. Labuha.

Budiono, (1982). *Ekonomi mikro.* Yogyakarta: BPFE.

Carter, R.W.G, (1988). *Coastal environment an introduction to the physyical ecologikal and cultural of coast line.* London: Academic Press.

Charles, A.T. (2001). *Sustainable fishery systems.* London: Blackwell Sciences .

Cornelis, R. (2005). Traditional marine conservation methods in oceania and their demise. *Journal of Marine Ann. Res. Ecol,* 5.(3), 140-160.

Dahuri R, J. Rais, S.P. Ginting, & M.J .Sitepu. (2001). P*engelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu.* Jakarta: PT. Pradya Paramita.

Dinas Sosial Prop. Maluku Utara. (1998). *Laporan Hasil data Tahunan Tingkat Kesejahteraan masyarakat Desa.* Ternate, Maluku Utara.

DKP Halsel, (2008). *Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Halmahera Selatan.* Halmahera Selatan: DKP Hal-Sel.

Idrus. M. R. (2003). Model pengelolaan sumberdaya dan pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan. Makalah Disajikan dalam *Lokakarya Penyusunan Renstra Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai. Kerjasama Pemda Sinjai-FPIK UNHAS, Sinjai 30 juli 2003.* Makassar

Kadariah. (1981). *Analisis pendapatan nacional.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk rakyat. memadukan pertumbuhan dan pemerintahan.* Jakarta: PT. Pustaka. Cidesido.

Kusnadi (2002). *Konflik Sosial masyarakat nelayan.* Jogyakarta: Penerbit LkiS.

LPPM UNHAS (2001). *Pengembangan kawasan pesisir dan arus bawah* Kabupaten Jeneponto. Makassar: Universitas Hasanuddin.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lubis & Huseini. (1987). *Teori organisasi suatu pendekatan makro.* Jakarta: LPFEUI.

Makeham, J.P. (1994). *Manajemen usaha tani daerah tropis.* Jakarta: LP3S.

Mahmudi. (1999). *Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa untuk peningkatan kesejahteraan.*Makassar: Universitas Hasanuddin.

Mattulada. (1997). *Sketsa pemikiran tentang kebudayaan, kemanusiaan, dan lingkungan hidup.* Ujung Pandang : Hasanuddin University Press.

Mosher. (1995). *Sumberdaya manusia sebagai modal pembangunan nasional.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mubyarto. (1987). *Nelayan dan kemiskinan.* Jakarta: CV. Rajawali.

Mubyarto. (1984). *Pengantar ekonomi pertanian.* Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.

Nashimura. (1973). *A preliminary report on current trend in marine anthropology.* Tokyo. Waseda University Tokyo

Nawir. (1983). *Manajemen pertanian.* Jakarta: PT. Pustaka Cidesionda.

Nugroho. (1999). *Kajian tingkat pendapatan petani dalam hubungannya dengan tingkat kemiskinan nasional.* Tesis Magister Manajemen Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar

Nurohmansyah. (2000). Efektifitas jam kerja terhadap pendapatan petani. *Tesis Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar.* Makassar.

Rangkuti, F. (2001). *Analisa SWOT teknik membedah kasus bisnis.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sayogyo (1983). *Perekonomian desa.* Jakarta: Penerbit Yayasan Obor

Sasono. (2000). *Ekonomi jaringan untuk pengembangan kelompok petani dan nelayan kecil.* Yogyakarta: Penerbit LkiS.

Satria, A. (2002). *Pengantar sosiologi masyarakat pesisir.* Bandung: Humaniora Utama Press.

Soekartawi (1986). *Ilmu usahatani dan penelitian untuk pengembangan petani kecil.* Jakarta: UI-Press.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Soekarno (1994). *hubungan sosial dan pola interaksi masyarakat desa.* Jakarta: Penerbit Yayasan Obor.

Sudarsono (1998). *Statistik, Edisi ke lima.* Bandung: Tarsito

Sugiarto (1997). Kinerja usaha penangkapan ikan pendukung pengembangan agribisnis perikanan di jawa tengah (kasus kodya pekalongan). *Jurnal Agribisnis*, Vol. 1 dan 1 Tahun 1997, JUBC. Jember.

Suklino (1981). Analisis tingkat pendapatan masyarakat desa. studi kasus masyarakat pesisir. *Tesis Paska Sarjana Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar*. Makassar

Sumardjo (1999). *Pemberdayaan ekonomi rakyat.* Bandung: Humaniora Utama Press.

Sudjana, (2002). *Metode penelitian.* Bandung: Tarsito.

Sumodiningrat, G. (1997). *Membangun perekonomian rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sunarto, K. (1993). *Pengantar sosiologi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi. Jakarta: Universitas Indonesia.

Suroso (1996). *Analisis pendapatan petani kecil.* Bandung: Humaniora Utama Press

Susenas (2001). *Laporan sensus penduduk nasional.* Jakarta: Badan Sensus Kependudukan Indonesia.

Taslim, A. (2002). *Nelayan dan kemiskinan.* Jakarta: Penerbit Yayasan Obor

Tangkesalu P. (1997). *Peran* pemerintah daerah dalam menangani kemiskinan di daerah. Studi Kasus di Desa Rantepao Kabupaten Tanah Toraja. *Tesis Paska Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar.* Makasar.

Tcondronegoro dan Betchol (1998). Mengenal bank pertanian. *Terjemahan. Journal Of Asian Studies,* 7 (3), 55-76.

Tohir. (1991). *Kajian sosial ekonomi masyarakat petani*. Jakarta: UI-Press

Wahyu. (1995). *Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.* Makalah yang tidak dipublikasikan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 1. Tabulasi Hasil Kuesioner

Jumlah responden = 50 KK penerima bantuan PEMP
Umur responden 25 – 60 tahun
Alamat responden seluruhnya di Desa Bajo Kecamatan Bacan Kab. Halmahera Selatan
Jenis Kelamin Semuanya Laki-laki
Agama Seluruhnya Agama Islam
Pendidikan 18 orang tamat SD, 23 tamat SMP dan 9 orang tamat SMA
Status Rumah Tempat Tinggal 45 kk milik 5 kk sewa
Jumlah Tanggungan Keluarga berkisar 4 – 8 orang
Pekerjaan 100% Nelayan
Besarnya penghasilan sebulan Rp. 600.000 – Rp. 1.500.000
Anggota keluarga yang bekerja bapak dan anak laki-laki yang sudah dewasa
90 % tidak mempunyai pekerjaan lain kecuali sebagai nelayan.

II. KISI-KISI ISI ANGKET

Meliputi tentang kepuasan dengan pekerjaan sebagai nelayan, pemenuhan kebutuhan hidup, peluang pekerjaan lain selain nelayan, mengapa memilih pekerjaan menjadi nelayan, perhatian pemerintah daerah setempat terhadap usaha penangkapan ikan, apa saja bantuan yang telah diberikan oleh instansi terkait dengan bidang usaha mereka dan berbagai hal yang berhubungan dengan bidang penelitian khususnya yang berhubungan dengan program PEMP.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 2. Nama-nama Informan yang diwawancarai

No	Nama	Pekerjaan	Alamat
1	Ilyas Sani	Kepala Desa Bajo	Desa Bajo
2	Badri Baba	Ketua LEPP-M3	Desa Bajo
3	Hamdan alkatiri	Ketua HNSI	Desa Bajo
4	Syamsuddin Hamzah, S.Kel	Kabid DKP Halsel	Labuha
5	Ala Manuhe	Tokoh Masyarakat	Desa Bajo
6	AR Muhammmad	Tokoh Masyarakat	Desa Bajo
7	Djamir	Nelayan	Desa Bajo
8	Laedy Laidogy	Nelayan	Desa Bajo
9	Ismail	Nelayan	Desa Bajo
10	Kashan Nurlette	Nelayan	Desa Bajo
11	Amrin Nurdin	Nelayan	Desa Bajo
12	Fari	Nelayan	Desa Bajo
13	Ilham	Nelayan	Desa Bajo
14	Rais Ibrahim	Nelayan	Desa Bajo
15	Ridwan	Nelayan	Desa Bajo
16	Zainal Baba	Nelayan	Desa Bajo
17	Taking	Nelayan	Desa Bajo
18	Idham sani	Nelayan	Desa Bajo
19	Rustan L	Nelayan	Desa Bajo
20	Ramli	Nelayan	Desa Bajo

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 3. Transkripsi Hasil Wawancara

Masyarakat Desa Bajo mayoritas bermatapencaharian sebagai nelayan oleh karena itu berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan mereka sangat antusias agar pemerintah dapat mendukung usaha ekonomi mereka khususnya dalam bidang usaha perikanan.

Program PEMP merupakan program yang sangat membantu usaha nelayan. Pada umumnya mereka sangat terbantu dengan adanya program ini. Dari pihak instansi terkait yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Halmahera Selatan telah berupaya melakukan pembinaan dan penyululan kepada masyarakat setempat kiranya kegiatan PEMP ini dapat berjalan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan namun dalam pelaksanaannnya masih terdapat kendala-kendala yang mereka hadapi. Misalnya tidak semua masyarakat nelayan dapat bantuan tersebut karena bantuannya terbatas dilain pihak banyak masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan tersebut.

Dalam melakukan aktifitas penangkapan ikan di laut ada beberapa hal juga yang menjadi hambatan bagi nelayan untuk melancarkan aktifitasnya salah satunya yaitu tingginya harga bahan bakar yang merupakan biaya operasional terbesar dalam melakukan aktifitas penangkapan sehingga hasil yang mereka dapatkan juga tidak sesuai dengan yang diharapkan dapat mendukung tingkat kebutuhan mereka sehari-hari.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 4. Gambar Alat Tangkap Ikan

Bagang

Hand Line

Pole and Line

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 5. Dokumentasi

Dokumentasi

Gambar 1. Tambatan Perahu Desa Bajo

Gambar 2. Salah Satu Armada Penangkapan Ikan Program PEMP

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

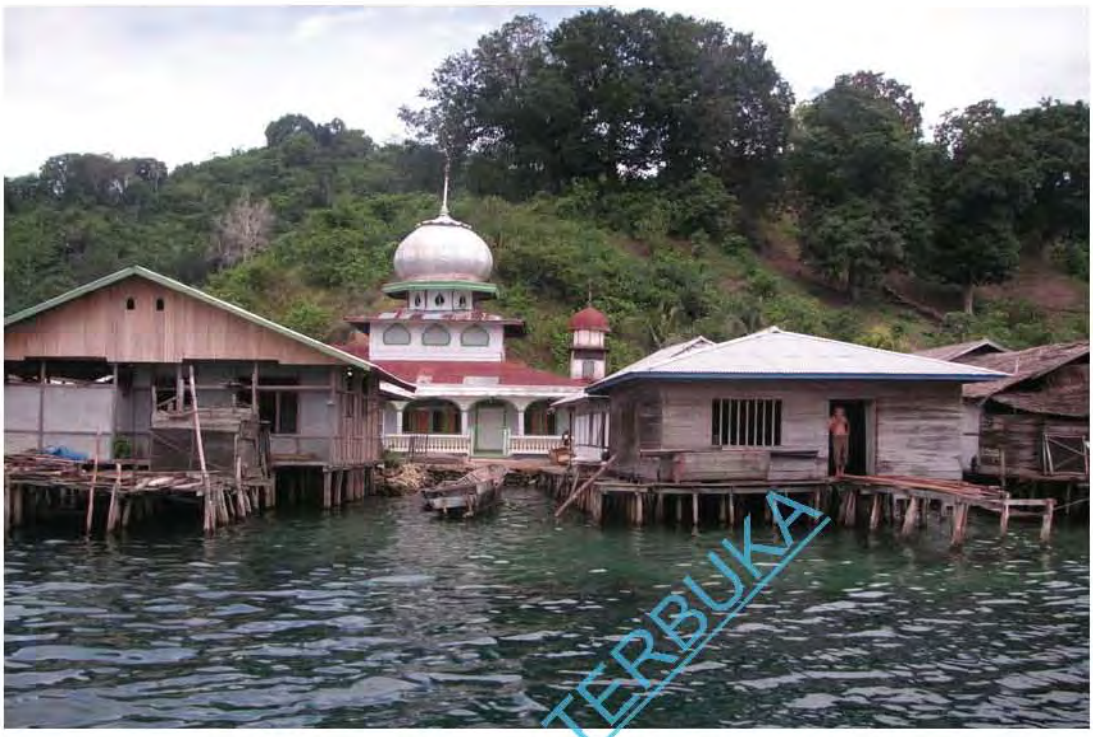

Gambar 3. Keberadaan Masjid diantara Perumahan Masyarakat Bajo

Gambar 4. Wawancara dengan kepala Desa Bajo..

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Gambar 5. Kondisi Perumahan Masyarakat Bajo

Gambar 6. Wawancara dengan Nelayan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka